



# LAPORAN TAHUNAN

**KANTOR WILAYAH  
KEMENTERIAN HUKUM DAN  
HAM PAPUA BARAT  
TAHUN 2022**





# KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2022 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat ini sebagai wujud dari akuntabilitas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Papua Barat yang disajikan kepada seluruh masyarakat untuk dapat melihat capaian-

capaian yang diraih Kantor Wilayah selama tahun 2022.

Laporan Tahunan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai umpan balik bagi seluruh pegawai di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing

Kedepan, kita lakukan perbaikan secara berkesinambungan untuk menjadikan Kementerian Hukum dan HAM yang lebih Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif (PASTI) serta Ber-AKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), sehingga mampu meningkatkan kepercayaan publik kepada Kementerian Hukum dan HAM.

**KEPALA KANTOR WILAYAH**  
  
**TAUFIQURRAKHMAN**  
**NIP 196811181991031001**

## **A. LATAR BELAKANG**

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya juga berusaha mengedepankan prinsip *good governance* dalam setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Sebagai bentuk pengukuran kinerja atas pelaksanaan setiap kegiatan dan pengelolaan sumber daya, maka dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat akan disajikan capaian-capaian kinerja, keberhasilan maupun hambatan yang dihadapi sebagai bahan dalam meningkatkan kinerja di masa mendatang. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat telah dibekali dengan berbagai sumber daya seperti dana (anggaran), personil, sarana dan prasarana kerja. Kajian tentang sejauh mana efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan sumber daya harus dapat dijelaskan kepada *stakeholder*. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat ini disusun dalam rangka menyiapkan informasi sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat luas di Provinsi Papua Barat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu komponen penilaian dari sistem kinerja instansi pemerintah dalam mengukur dan memantau kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat

## **B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kedudukan, Tugas dan fungsi Kantor Wilayah sebagaimana berikut :

- (1) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, berkedudukan di provinsi, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- (2) Kantor Wilayah dipimpin oleh seorang kepala;
- (3) Kepala Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengoordinasikan pelaksanaan tugas para kepala divisi.

Tugas Kepala Kantor Wilayah yaitu melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kantor Wilayah menyelenggaraan fungsi antara lain:

- a. Pengoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi Hukum umum, Kekayaan Intelektual, dan Pemberian Informasi Hukum;
- c. Pelaksanaan fasilitasi perancangan produk hukum daerah dan pengembangan budaya hukum serta penyuluhan, konsultasi dan bantuan hukum;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan operasional unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang Keimigrasian dan bidang masyarakat;
- e. Penguatan dan pelayanan hak asasi manusia untuk mewujudkan penghormatan, pemenuhan, pemajuan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia; dan
- f. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia terbagi menjadi 4 Divisi sebagai berikut:

1. Divisi Administrasi;
2. Divisi Masyarakat;
3. Divisi Keimigrasian; dan
4. Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada pasal 57 ayat (1) Unit Pelaksana Teknis merupakan Unit yang melaksanakan tugas teknis operasional dan /atau kegiatan teknis penunjang di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ayat (2) Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala. Selanjutnya pada ayat (3) Kepala Unit Pelaksana Teknis berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal atau Kepala Badan melalui Kepala Divisi terkait.

Tabel. I.1 Unit Pelaksana Teknis

No	Unit Pelaksana Teknis	Alamat
1.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Manokwari	Jln. Sabang No.4 Telp.(0986) 211387-211744, Fax (0986) 211744 Pos : 106
2.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sorong	Jln. Sapta Taruna Km.10 Telp/Fax (0951) 327417 Kelurahan Sawa Gumu Sorong Utara
3.	Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Fak Fak	Jln. Letjen S Parman No.1 Fak-Fak Papua Barat.
4.	Kantor Imigrasi Non TPI Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Arfai II Manokwari, Papua Barat E-mail : imigrasimanokwari@yahoo.co.id
5.	Kantor Imigrasi TPI Kelas II Sorong	Jln. Mesjid Raya HBM, Telp. (0951) 321915 Fax. 321393 E-mail:kanim sorong@imigrasi.go.id/kanim sorong63@gmail.com Twitter : @imigrasi-sorong, Sorong - 98416
6.	Lapas Kelas III Teminabuan	Jln. S. Konjol No.3 Telp/Fax (0952) 31037 Sorong Selatan
7.	Lapas Kelas III Rutan Kaimana	Jln. PTT Kaimana Kota Telp/Fax. (0957) 21020
8.	Balai Pemasyarakatan Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Anday (Depan Pesantren HidayahTullah) Manokwari-Papua Barat
9.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Sorong	Jln. Sapta Taruna Km.10 Kelurahan Sawa Gumu Sorong Utara
10.	Rutan Kelas IIB Bintuni	Jln. Raya Bintuni Km.09 Bintuni, Telp/Fax (0955) 32188, Email: rutanbintuni@gmail.com
11.	Rupbasan Kelas I Manokwari	Jln. Trikora Anday (Depan Pesantren HidayahTullah) Manokwari-Papua Barat
12.	Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Manokwari	Jln. Wasay, Kel Anday, Kec. Manokwri Selatan, Kab, Manokwari. Papua Barat
13.	Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Manokwari	Jln. Wasay, Kel Anday, Kec. Manokwri Selatan, Kab, Manokwari. Papua Barat
14.	Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak	Jln. Letjen S Parman No.1 Fak-Fak Papua Barat.

### C. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam rangka

mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah antara lain :

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat dan masyarakat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

#### **D. ASPEK STRATEGIS**

Keberadaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat sangat berperan penting dalam Pemerintahan di Wilayah Provinsi Papua Barat. Pertama dibuktikan perannya dalam pembentukan produk hukum daerah, pada tahun 2022 terdapat 30 Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) yang telah di Harmonisasi. Dalam pelayanannya Divisi Pelayanan Hukum pada Kantor Wilayah yang dimana lingkup pelayanannya langsung kepada masyarakat dan Pemerintah Daerah membuat peran Kantor Wilayah sangat strategis. Bukan hanya dalam pembentukan Produk Hukum, tetapi Layanan Kekayaan Intelektual dan Administrasi Hukum Umum. Beberapa kegiatan telah dilaksanakan bersama Pemerintah Daerah dan BUMN dalam meningkatkan kesadaran pentingnya Kekayaan Intelektual di Papua Barat. Kekayaan Alam yang melimpah, terdapat banyak spesies tanaman dan jenis hewan yang hanya ada di Tanah Papua menjadi peran penting Kantor Wilayah dalam melakukan indikasi geografis bersama Pemerintah Daerah. Semakin terkenalnya pesona Papua Barat dalam wisata Alam seperti Raja Ampat dan masuknya perusahaan-perusahaan besar asing yang masuk membuat meningkatnya wisatawan dan pekerja asing yang harus diawasi, itu juga menjadi peran penting Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik untuk mendukung dan menjaga Provinsi Papua Barat tetap baik.

#### **E. ISU STRATEGIS**

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat selama Tahun 2022, terdapat beberapa isu srategis yang memperlambat bahkan menghambat pelaksanaan kegiatan antara lain :

- 1) Terdapat beberapa jabatan struktural yang belum di isi dan kurangnya pegawai yang pada jabatan-jabatan tertentu yang membuat setiap pegawai merangkap jabatan sehingga terjadi tumpang tindih.
- 2) Kurangnya koordinasi antar Divisi dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak ada kerjasama yang baik dalam percepatan pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- 3) Rehabilitasi kantor membuat wilayah kerja dan pelaksanaannya terganggu.

## **F. SISTEMATIKA LAPORAN**

- KATA PENGANTAR** : Menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar berkaitan dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2022.
- RINGKASAN EKSEKUTIF** : Menyajikan ringkasan isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat Tahun 2022.
- BAB I PENDAHULUAN** : Menjelaskan secara singkat latar, tugas, fungsi dan struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek strategis, isu strategis, sistematika laporan.
- BAB II PERENCANAAN KINERJA** : Menjelaskan Rencana Strategis yang berisi visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta kebijakan/strategi dalam upaya pencapaian kinerja, dan Perjanjian Kinerja yang berisi lembar/dokumen penugasan untuk melaksanakan program/kegiatan.
- BAB III AKUNTABILITAS KINERJA** : Menguraikan capaian kinerja organisasi, analisis pencapaian kinerja serta analisis keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala dan upaya yang dilakukan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam mencapai Target Kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.



Selain memberikan penjelasan dan analisis capaian kinerja, setiap indikator kinerja juga dilakukan analisis sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### **BAB IV PENUTUP**

- : Menjelaskan kesimpulan dan saran menyeluruh Laporan Kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tahun 2022 serta upaya/strategi dalam meningkatkan capaian kinerja tahun 2023.

#### **LAMPIRAN**

- : - Perjanjian kinerja tahun 2022;  
- Perjanjian kinerja tahun 2023;  
- Prestasi dan penghargaan.

# **BAB II**

## **PERENCANAAN KINERJA**

## **A. PERENCANAAN STRATEGIS**

Perencanaan strategis merupakan proses berkelanjutan dan sistematis dalam membuat perencanaan dan kebijakan, yaitu dengan memanfaatkan sebanyak-banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasikannya untuk usaha-usaha melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik.

Disusunnya perencanaan strategis sebagai acuan dalam pengelolaan sumber daya. Diharapkan dengan adanya perencanaan strategis tersebut, pengelolaan sumber daya dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta mengakomodasi dan mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal yang terjadi.

Dalam Perencanaan Strategis yang meliputi pernyataan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran serta Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja.

### **1. Visi**

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020-2024 di bawah kepemimpinan Presiden Ir. Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) misi pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga;

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan Misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;
3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 (dua) Undang-Undang. Pertama, Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Kedua, Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai bagian dari pemerintah, maka untuk mendukung terwujudnya visi, pelaksanaan misi, arahan Presiden dan agenda pembangunan, maka ditetapkan visi Kementerian Hukum dan HAM tahun 2020-2024 adalah: **"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden "Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"**

## **2. MISI**

Sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melaksanakan Misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 6 yaitu penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya, misi nomor 7 yaitu perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga negara dan misi nomor 8 yaitu pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya. Ketiga misi Presiden tersebut

diterjemahkan ke dalam 7 (tujuh) misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai berikut:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum, dan pemasyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan.

### **3. TATA NILAI**

Nilai-nilai dasar ASN "BerAKHLAK" merupakan akronim dari Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Nilai-nilai ini diharapkan akan dapat menjadi fondasi budaya kerja ASN yang profesional. Ber-AKHLAK BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Adanya core values ASN ini sebagai sari dari nilai-nilai dasar ASN sesuai dengan Undang-Undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dalam satu kesamaan persepsi yang lebih mudah dipahami dan diterapkan oleh seluruh ASN.

- a. Berorientasi Pelayanan yakni memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan, melakukan perbaikan tiada henti.
- b. Akuntabel yakni melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien, tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.
- c. Kompeten yakni meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
- d. Harmonis yakni menghargai setiap orang apapun latar belakangnya, suka menolong orang lain, membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- e. Loyal yakni memegang teguh ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah, menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
- f. Adaptif yakni cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan, terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas, bertindak proaktif.
- g. Kolaboratif yakni memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam bekerjasama untuk menghasilkan nilai tambah, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

Tata Nilai PASTI Sementara untuk mendukung pelaksanaan visi dan misi, maka dalam kurun waktu 2020-2024 Kementerian Hukum dan HAM menetapkan kembali "PASTI" sebagai tata nilai (values) Kementerian Hukum dan HAM serta unit pelaksana dibawahnya. Tata nilai tersebut diharapkan menjadi tuntunan perilaku bagi sumber daya manusia yang berada di dalam organisasi sehingga dapat mewujudkan Kementerian Hukum dan HAM sebagai institusi pemerintahan kelas dunia, berkualitas, bermartabat, dan terpercaya. Nilai-nilai yang mendukung dan memandu disaat tugas dan tanggung jawab sedang dikerjakan adalah :

1. Profesional Aparatur Kementerian Hukum dan HAM adalah aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi;
2. Akuntabel Setiap kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku;
3. Sinergi Komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat, dan berkualitas;
4. Transparan Kementerian Hukum dan HAM menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai;

5. Inovatif Kementerian Hukum dan HAM mendukung kreatifitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

#### 4. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan yang ingin dicapai dari 4 (empat) misi adalah :

- b. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi.
- c. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- d. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.
- e. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.

- f. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

Melalui pendekatan Analisa *Strength, Weakness, Opportunity* dan *Threat* (SWOT) tersebut, maka sasaran strategis sebagai berikut :

- a. Terwujudnya peraturan perundang-undangan yang melindungi kepentingan nasional melalui proses pembentukan peraturan perundang-undangan yang akurat, terkini dan terharmonisasi.
- b. Terwujudnya pelayanan hukum yang sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melalui peningkatan pengawasan dan pengelolaan di bidang masyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual dan administrasi hukum umum.
- c. Terwujudnya penegakan hukum yang menjadi pendorong inovasi, kreatifitas dan pertumbuhan ekonomi nasional dengan penegakan hukum yang tidak diskriminatif serta aparat penegak hukum yang profesional.

- d. Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia serta budaya hukum yang berkelanjutan.
- e. Terwujudnya manajemen organisasi yang akuntabel dengan penyelenggaraan reformasi birokrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang profesional.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat memiliki 21 Sasaran Kegiatan dan 54 Indikator Kinerja Kegiatan yang terdapat pada 9 program. Untuk mencapai Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja pada tahun 2022, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memperoleh anggaran sebesar Rp 26.573.857.000 dengan pengalokasian pada setiap satuan kerja sebagai berikut;

Tabel II.1 Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Tahun 2022

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Program	Anggaran
<b>Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien</b>	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	Dukungan Manajemen	18.935.233.000
<b>Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	2.507.776.000
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks		
<b>Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum</b>	Persentase peningkatan PNBPA Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	1.961.271.000
<b>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD</b>	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%		
<b>Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM</b>	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	7 Layanan	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	1.059.908.000
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus		
<b>Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal</b>	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	1.059.908.000
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus		
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan		



<b>Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah</b>	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	Pembentukan Regulasi	185.000.000
<b>Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan</b>	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	7 Orang		
<b>Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah</b>	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	Pembentukan Regulasi	474.708.000
<b>Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah</b>	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%		
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%		
	Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%		
	Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%		
	Persentase anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%		
<b>Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM</b>	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Instansi Pemerintah	Program Pemajuan Dan Penegakan HAM	259.675.000
	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah		
	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah		
<b>Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</b>	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi		
<b>Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia</b>	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	Dukungan Manajemen	111.312.000
	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku		
<b>Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah</b>	Indeks penyelenggaraan masyarakatan di wilayah	81%	Program Pelayanan Dan Penegakan Hukum	1.078.974.000
<b>Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar</b>	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%		
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%		

	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%		
<b>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</b>	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%		
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%		
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%		
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%		
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%		
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%		
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%		
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang		
	<b>Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar</b>	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	
Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap		60%		
<b>Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</b>	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%		
	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%		
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%		
<b>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar</b>	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%		
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%		
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%		
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%		
<b>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</b>	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%		
	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%		
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh	80%		

	Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib		
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	
<b>Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar</b>	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	

## B. PERJANJIAN KINERJA



### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022 KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Taufiqurrahman  
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai templan perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 April 2022

Pihak Kedua,  
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,  
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat

Komjen. Pol. Andap Budhi Revianto

Taufiqurrahman  
NIP. 195811161981031001

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tewujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks

# **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

## A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Papua Barat berisi capaian seluruh indikator yang dihitung dengan cara membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan, analisa dari setiap indikator dan perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya serta kendala/hambatan dalam pelaksanaan kegiatan.

Tabel III.1 Capaian Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Jumlah IKK	Capaian	Keterangan
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	1	113%	Tercapai
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	2	272%	Tercapai
3	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	1	100%	Tercapai
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	1	0%	Tidak Tercapai
5	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	2	271%	Tercapai
6	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	3	183%	Tercapai
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	1	150%	Tercapai
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	1	100%	Tercapai
9	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	1	100%	Tercapai
10	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	5	137%	Tercapai
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	3	200%	Tercapai
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	1	33%	Tidak Tercapai
13	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	2	100%	Tercapai
14	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakatan yang berkualitas di wilayah	1	125%	Tercapai
15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	3	87,5%	Tidak Tercapai
16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	8	70,5%	Tidak Tercapai
17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	2	97,2%	Tidak Tercapai
18	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien masyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	3	47,7%	Tidak Tercapai

19	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	4	70,3%	Tidak Tercapai
20	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	4	98,3%	Tidak Tercapai
21	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	4	98,3%	Tidak Tercapai

Tabel III.2 Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Kantor Wilayah

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian	Anggaran
1	Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3,1 Indeks	3,5 Indeks	113%	18.935.233.000
2	Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,90 Indeks	122%	2.507.776.000
		Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,66 Indeks	117%	
		Indeks Kepuasan Internal di wilayah	3,12 Indeks	3,12 Indeks	100%	
3	Terwujudnya layanan adminitrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum	Persentase peningkatan PNPB Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5 %	100 %	1.961.271.000
4	Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	0 %	0 %	
5	Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	7 Layanan	5 Layanan	71%	1.059.908.000
		Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%	
6	Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%	185.000.000
		Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	2 Lokus	3 Kegiatan	300%	
		Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	3 Laporan	150%	
7	Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah	Persentase rancangan perda yang difasilitasi oleh kantor wilayah kemenkumham	80%	120%	150%	185.000.000
8	Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan	7 Orang	7 Orang	100%	
9	Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%	474.708.000
10	Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81%	92,8%	114%	

		Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80%	46,5%	58%	
		Indeks kepuasan layanan bantuan hukum	76,61%	56%	73%	
		Persentase desa/kelurahan sadar hukum yang terbentuk di masing-masing wilayah	70%	80%	114%	
		Persentase anggota JDH yang berpartisipasi aktif	20%	65%	325 %	
11	Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	6 Intansi Pemerintah	300%	259.675.000
		Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	200%	
		Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%	
12	Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	33%	
13	Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%	111.312.000
		Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%	
14	Terwujudnya penyelenggaraan pelayanan masyarakat yang berkualitas di wilayah	Indeks penyelenggaraan masyarakat di wilayah	81%	100%	125%	1.078.974.000
15	Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%	
		Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	87,5%	
		Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	60%	75%	
16	Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	100%	
		persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	90%	91,8%	
		persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	75%	93,7%	
		persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	80%	100%	
		Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	-	0	
		Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	25%	89,2%	
		Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	60%	89,5%	
		Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	-	0%	

17	Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	70%	100%
		Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	57%	95%
18	Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga	50%	30%	60%
		Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	50%	83,3%
		Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya	30%	0%	0%
19	Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
		Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%		
		Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	65%	81,2%
20	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasyarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	80%	100%
		Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	67%	95,7%
		Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	78%	97,5%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	100%
21	Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	100%
		Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	67%	95,7%
		Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak pelaku gangguan kamtib	80%	78%	97,5%
		Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	100%

Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dijabarkan menurut Sasaran Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Berjumlah 21 (dua puluh satu) Sasaran Kegiatan yang dijabarkan sebagai berikut;

## SASARAN KEGIATAN 1



## Sasaran Kegiatan

*Terwujudnya layanan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah yang efektif dan efisien*

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja kegiatan yaitu (1) Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah.

### 1) Indeks Kepuasan Layanan Internal Di Lingkungan Kantor Wilayah

#### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tabel. III.3 Capaian Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.5 Indeks	113%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks kepuasan layanan internal})}{\Sigma (\text{Target Indeks kepuasan layanan internal})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3.5)}{\Sigma (3.1)} \times 100\% = 113\%$$

Pada Tahun 2022 capaian indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah diambil dari survei integritas internal organisasi yang dilakukan setiap bulan melalui survei Balitbangham.

#### b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya

Berdasarkan hasil perbandingan tahun 2022 dan 2021, realisasi Persentase capaian Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah memenuhi target tahun 2021 sebesar 110% meningkat pada tahun 2022 sebesar 113%.

Tabel. III. 4 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan layanan internal dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.5 Indeks	113%

<b>2021</b>	Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah	3.1 Indeks	3.42 Indeks	110%
-------------	---	---------------	----------------	------

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

Jika dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Rencana Strategis, target di tahun 2023 dan di 2024 sudah terlampaui.

Tabel III.5 Perbandingan Capaian Indeks kepuasan layanan internal dengan Renstra

Indikator Kinerja Kegiatan	Target			
	2021	2022	2023	2024
<b>Indeks kepuasan layanan internal di lingkungan Kantor Wilayah</b>	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks	3.1 Indeks

**d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak masuk dalam target standar nasional Kementerian Hukum dan HAM.

**e) Penyebab Keberhasilan**

**f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Capaian Tahun 2022 di hitung dari pelaksanaan terhadap proses perencanaan, penganggaran, layanan kepegawaian dan tatausaha, layanan kehumasan dan layanan keuangan dan BMN. Dengan uraian sebagai berikut;

- 1) Perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, akuntabel dan transparan.
  - Proses perencanaan dan penganggaran dilaksanakan dengan melibatkan pimpinan mulai dari kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja dan Evaluasi dan Supervisi Pagu Indikatif, Pagu Anggaran, Pagu Alokasi, Penyusunan Disbursement Plan, Procurement Plan dan Kalender Kerja. Hasil dari kegiatan-kegiatan tersebut berupa dokumen Renja, PK, RKA/KL, RPD dari 23 SATKER yang ada di Kanwil Papua Barat. Bukan hanya penganggaran Kegiatan lainnya seperti Ketatalaksanaan, SPIP, Manajemen Risiko,

Penyusunan Laporan Kinerja, Monitoring dan Evaluasi Kinerja juga telah terlaksana dengan baik pada tahun 2022.

- 2) Layanan kepegawaian dan tatausaha yang tepat posisi dan tepat waktu
- Pada Tahun 2022 kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian, tatausaha dan rumah tangga telah berjalan dengan baik, meliputi proses pemetaan jabatan, mutasi jabatan/pegawai, pengelolaan pegawai dan seluruh tugas dan fungsi yang ada pada sub bagian ini.
  - Selama tahun 2022 terdapat beberapa layanan Kepegawaian dan tatausaha yang terlaksana dengan baik dengan uraian dalam tabel sebagai berikut;

Tabel III.5 Layanan Kepegawaian

Layanan Kepegawaian	Jumlah Pengajuan
<b>Kenaikan Pangkat</b>	217
<b>Pensiun</b>	7
<b>Katru Istri/Suami</b>	0
<b>TASPEN</b>	16
<b>KARPEG</b>	39

- 3) Layanan kehumasan yang terpublikasikan kepada masyarakat secara tepat dan benar

- Pengelolaan Website Kantor Wilayah dan Sosial Media

Sebagai wadah informasi seluruh kegiatan-kegiatan yang terlaksana sesuai tata nilai Pasti yaitu transparan.

Website : [papuabarat-kemenkumham.go.id](http://papuabarat-kemenkumham.go.id).

Facebook : [web.facebook.com/humaspabar](http://web.facebook.com/humaspabar)

Twitter : [@Kemenkumham\\_PB](https://twitter.com/Kemenkumham_PB)

Youtube : [@Kemenkumham Pabar](https://www.youtube.com/@Kemenkumham_Pabar)

Selama tahun 2022 TIM HUMAS Kanwil Papua Barat telah meliput dan mempublikasikan kurang lebih 454 berita yang telah di posting pada Website dan juga media sosial.

- Reformasi Birokrasi

Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat berkomitmen untuk melaksanakan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan sasaran

Reformasi Birokrasi dengan menjalankan 8 area perubahan, yaitu Manajemen Perubahan, Penataan Peraturan Perundang-Undangan, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Ketatalaksanaan, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam pemenuhan data dukung Lembar Kerja Elektronik Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi dan Lembar Kerja Elektronik Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih pada tahun 2022 Kantor Wilayah sudah menyelesaikannya 100% melalui website [erb.kemenkumham.go.id](http://erb.kemenkumham.go.id).

➤ E-Lapor

Pada tahun 2022 tidak ada pengaduan yang dilaporkan melalui website e-lapor dan nomor pengaduan maupun media sosial.

4) Layanan Keuangan dan BMN

- Pada Tahun 2022 kegiatan pada Sub Bagian Keuangan dan BMN telah berjalan dengan baik, mulai dari penyusunan RKBMN, pengadaan Barang dan Jasa hingga laporan keuangan.
- Total seluruh aset pada Kantor Wilayah berjumlah 2389, terdapat 90 aset yang rusak berat 42 diantaranya telah ditindaklanjuti untuk dilakukan penghapusan.

Kendala dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yaitu kurangnya SDM sehingga para pegawai banyak yang merangkap tugas dan fungsi, yang menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan di berbagai bidang terutama Administrasi; Contoh: Jabatan Arsiparis, Jabatan Protokoler, Jabatan tatalaksana, Jabatan Penghapusan BMN, dll

## SASARAN KEGIATAN 2

### ***Sasaran Kegiatan***

*Meningkatnya kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian di Wilayah*

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan tiga indikator kinerja Kegiatan yaitu (1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah, (2) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah, (3) Indeks Kepuasan Internal di wilayah.

### a) Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

#### 1) Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Tabel III. 5 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,20 Indeks	3,90 Indeks	122%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi IKM Layanan Keimigrasian})}{\Sigma (\text{Target IKM Layanan Keimigrasian})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3.90)}{\Sigma (3.20)} \times 100\% = 122\%$$

#### 2) Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah.

Tabel III.6 Capaian Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,12 Indeks	3,66 Indeks	117%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Pengamanan Keimigrasian})}{\Sigma (\text{Target Indeks Pengamanan Keimigrasian})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3.66)}{\Sigma (3.12)} \times 100\% = 117\%$$

#### 3) Indeks Kepuasan Internal di Wilayah.

Tabel III.7 Capaian Indeks Kepuasan Internal di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----------------------------	--------	-----------	---------

<b>Indeks Kepuasan Internal di wilayah</b>	3,12 Indeks	3,12 Indeks	100%
--	----------------	----------------	------

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Kepuasan Internal di wilayah})}{\Sigma (\text{Target Indeks Kepuasan Internal di wilayah})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3.12)}{\Sigma (3.12)} \times 100\% = 100\%$$

**b) Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya**

Tabel III. 8 Perbandingan Capaian Kinerja Program Keimigrasian Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3.20 Indeks	3.90 Indeks	122%
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3.12 Indeks	3.66 Indeks	117%
	Indeks Kepuasan Internal di wilayah	3,12 Indeks	3,12 Indeks	100%
<b>2021</b>	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Keimigrasian di Wilayah	3,15 Indeks	3,15 Indeks	100%
	Indeks Kepuasan Internal di Wilayah	3,11 Indeks	3,11 Indeks	100%
	Indeks Pengamanan Keimigrasian di Wilayah	3,11 Indeks	3,11 Indeks	100%
	Indeks Kepuasan Internal di wilayah	3,12 Indeks	3,12 Indeks	100%

**c) Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra**

**d) Perbandingan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional**

Indikator Kinerja Kegiatan ini tidak masuk dalam terget standar nasional Kementerian Hukum dan HAM.

**e) Penyebab Keberhasilan**

**f) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan**

Capaian Kinerja sesuai dengan DIPA dan Kalender kinerja Tahun 2022 pada setiap indikator kinerja pada Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat :

1. Persentase (%) kegiatan pembinaan dan pengawasan UPT Keimigrasian

a. Koordinasi

1) Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian.

- Terlaksananya Kegiatan pembinaan dan Koordinasi pada Bidang Intelijen dan Penindakan Keimigrasian
  - Kegiatan yang direncanakan Sebanyak 3 kali dan terlaksana 3 kali
- Target Capain : 100 %

Realisasi :  $3/3 \times 100 \% = 100 \%$

2) Pembinaan, Pengendalian, Kerjasama, Pemantauan, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian.

- Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Koordinasi pada Bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
  - Kegiatan yang direncanakan Sebanyak 3 kali dan terlaksana 3 kali
- Targer Capain : 100%

Realisasi :  $3/3 \times 100\% = 100\%$

3) Penilaian Jabatan Fungsional Analisis Keimigrasian

- Terlaksananya kegiatan Penilaian Jabatan fungsional Analisis Keimigrasian
  - Kegiatan yang direncanakan 2 kali dan terlaksana 2 kali
- Targer Capain : 100%

Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$

b. Operasi Bidang Keamanan

1) Penyidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah.

- Terlaksananya Penyidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah dalam Pelaksanaan Pengumpulan data informasi serta Penyajian Laporan
- Kegiatan yang direncanakan 8 kali, dan yang terlaksana 8 kali
- Target Capaian : 100%

- Realisasi :  $8/8 \times 100\% = 100\%$

- 2) Operasi Gabungan Wilayah Timur
    - Terlaksananya Operasi Gabungan Wilayah Timur.
    - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
    - Target Capaian : 100%
    - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$
  - 3) Penyidikan Tindakan Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur.
    - Terlaksananya Penyidikan Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur
    - Kegiatan yang direncanakan 1 kali, dan yang terlaksana 0 kali
    - Target Capaian : 100%
    - Realisasi :  $0/1 \times 100\% = 0\%$
  - 4) Pengawasan Orang Asing
    - Terlaksananya Pengawasan Orang Asing.
    - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
    - Target Capaian : 100%
    - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$
2. Persentase (%) kegiatan yang terlaksana di bidang Perizinan dan Informasi Keimigrasian
- Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Perizinan dan Informasi keimigrasian
  - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
  - Target Capaian : 100%
  - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$
3. Persentase (%) kegiatan yang terlaksana di bidang Intelijen, Penindakan, dan Sistem Informasi Keimigrasian.
- a) Terlaksananya Pembinaan, Koordinasi dan Konsultasi Bidang Intelijen, Penindakan Informasi dan Sarana Komunikasi Keimigrasian.
    - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
    - Target Capaian : 100%
    - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$
  - b) Penyidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah.



- Terlaksananya Penyidikan Intelijen Keimigrasian di Wilayah dalam Pelaksanaan Pengumpulan data informasi serta Penyajian Laporan
  - Kegiatan yang direncanakan 8 kali, dan yang terlaksana 8 kali
  - Target Capaian : 100%
  - Realisasi :  $8/8 \times 100\% = 100\%$
- c) Operasi Gabungan Wilayah Timur
- Terlaksananya Operasi Gabungan Wilayah Timur.
  - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
  - Target Capaian : 100%
  - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$
- d) Penyidikan Tindakan Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur.
- Terlaksananya Penyidikan Pidana Keimigrasian di Wilayah Timur
  - Kegiatan yang direncanakan 1 kali, dan yang terlaksana 0 kali
  - Target Capaian : 100%
  - Realisasi :  $0/1 \times 100\% = 0\%$
- e) Pengawasan Orang Asing
- Terlaksananya Pengawasan Orang Asing.
  - Kegiatan yang direncanakan 2 kali, dan yang terlaksana 2 kali
  - Target Capaian : 100%
  - Realisasi :  $2/2 \times 100\% = 100\%$

#### **Permasalahan/Kendala**

- a) Kurangnya SDM pada Divisi Keimigrasian Wilayah Papua Barat, sehingga mengakibatkan jumlah pekerjaan yang tidak sebanding dengan jumlah pegawainya;
- b) Untuk kegiatan Intelijen diwilayah Kerja Divisi Keimigrasian masih sangat terhambat dengan kondisi geografis yang rawan dan jarak tempuh yang sangat jauh untuk wilayah kerja Divisi Keimigrasian Papua Barat.

### SASARAN KEGIATAN 3

#### Sasaran Kegiatan

*Terwujudnya layanan administrasi hukum umum di wilayah yang berkepastian hukum*

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

#### 1) Persentase Peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di Wilayah

##### a) Capaian

Tabel III.9 Capaian Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5 %	5 %	100 %

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Peningkatan PNBP})}{\Sigma (\text{Target Peningkatan PNBP})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (5)}{\Sigma (5)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.10 Perbandingan Capaian Administrasi Hukum Umum Dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	100 %
2021	Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum di wilayah	5%	5%	100 %

Tabel III.11 Penerimaan PNBP Kanwil Papua Barat

Permohonan	Total Transaksi PNBP Kanwil PAPUA BARAT	Total Penerimaan PNBP Kanwil PAPUA BARAT
<u>PNBP</u>	14,210	Rp. 1.572.100.000

Penerimaan PNBP sampai Bulan Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.572.100.000 dengan jumlah permohonan dan transaksi sebanyak 14.210. Persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum adalah 100 % dengan target 5 % dimana volume layanan sebesar 14.210 dengan jumlah penerimaan PNBP di tahun 2022 sebesar Rp. 1.571.100.000,- .

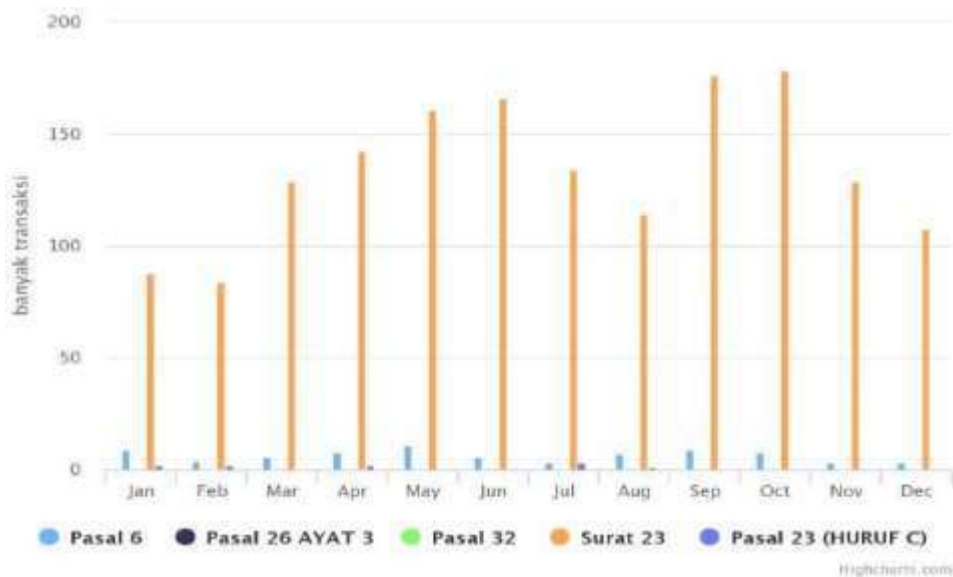
## b. Faktor Keberhasilan

Capaian persentase peningkatan PNBP Administrasi Hukum Umum dapat di uraikan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

### ➤ Layanan Kewarganegaraan

Pengambilan Sumpah Kewarganegaraan

Table III. 12 Grafik Transaksi Layanan Kewarganegaraan



Sumber data : Ahu online

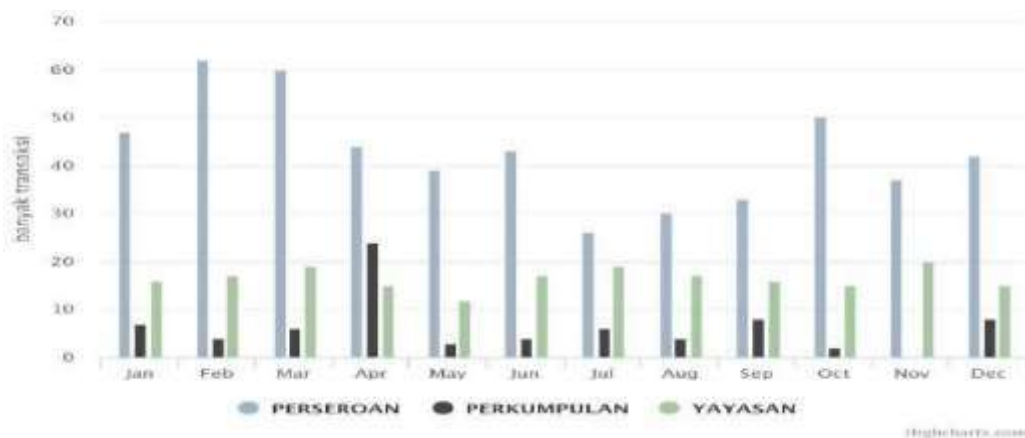
### ➤ Pelantikan Notaris

Telah dilakukan Pelantikan terhadap 7 (tujuh) orang Notaris yaitu

- Kabupaten Manokwari sebanyak 2 (dua) orang;
- Kota Sorong sebanyak 3 (tiga) orang ; dan
- Kabupaten Sorong sebanyak 2 (dua) orang

## ➤ Pengesahan Pendirian Badan Hukum

Table III. 13 Grafik Pendirian Badan Hukum



Sumber data : Ahu online

Dari table grafik diatas dapat dijelaskan bahwa capaian di Tahun 2022 untuk pengesahan Badan Hukum Perseroan lebih banyak dibandingkan dengan Badan Hukum Perkumpulan dan Badan Hukum Yayasan.

Pencapaian Output tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

- Kurangnya tenaga / pegawai pada Divisi pelayanan Hukum dan HAM;
- Kurangnya komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan;
- Lambatnya respon dari instansi terkait;
- Terbatasnya maksimum pencairan.

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya efektivitas pelaksanaan tugas MKNW, MPW dan MPD</i>	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris

### 1) Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku dan Pelaksanaan Jabatan Notaris

#### a. Capaian

Tabel III.14 Capaian Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah</b>	82 %	0 %	0 %

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat})}{\Sigma (\text{Target Presentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (0)}{\Sigma (82)} \times 100\% = 0 \%$$

Persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris adalah 0 % dengan target sebanyak 82 %. Hal ini disebabkan karena tidak adanya laporan pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris.

Tabel III. 15 Perbandingan Capaian Kinerja Program AHU Tahun Sebelumnya

<b>Tahun</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
--------------	-----------------------------------	---------------	------------------	----------------

<b>2022</b>	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	-	0%
<b>2021</b>	Persentase penyelesaian laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris di wilayah	82%	-	0%

**a. Faktor Keberhasilan**

Capaian persentase penyelesaian pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris dapat di uraikan dalam pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

➤ **Penanganan Permasalahan Kenotariatan**

- a. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW;
- b. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPD
- c. Pelantikan MPD
- d. Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MKN
- e. Rapat Koordinasi MPW dan MPD

Dilaksanakan pada Bulan November bertempat di The Rylich Hotel Kota Sorong

➤ **Pengawasan Kenotariatan**

1. Pengawasan Kenotariatan pada MPW;
2. Pengawasan Kenotariatan pada MPD.

➤ **Tindaklanjut Laporan Pengaduan**

Tidak ada laporan pengaduan dari masyarakat terhadap Notaris Penerimaan Pengaduan Masyarakat ke MPDN Kab/Kota Sorong dari Bulan Januari s/d November 2022

Tabel III.16 Tindaklanjut Laporan Pengaduan

No	Hari/tanggal	Pelapor	Terlapor	Perihal	Keterangan
<b>Permohonan diterima</b>					
1.	-	-	-	-	Tidak ada Laporan Pengaduan

➤ **Perpanjangan Masa Jabatan Notaris**

Tabel III.17 Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

No	Nama Notaris	Notaris Wilayah	No. Surat
1.	-	-	-

➤ **Cuti Notaris**

Cuti Notaris diajukan melalui Aplikasi Apelaris

➤ **Pemeriksaan Protokol Notaris**

Pemeriksaan Protokol Notaris telah dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa pada Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota/Kabupaten sorong Bersama Sekretariat Majelis Pengawas Daerah Notaris terhadap para Notaris yang berkedudukan di Kota dan Kabupaten Sorong yang dilaksanakan pada Bulan Oktober dan November 2022.

➤ **Penerimaan Laporan Bulanan Notaris**

Laporan Bulanan Notaris dilaporkan oleh masing-masing Notaris pada Aplikasi Apelaris.

➤ **Data Notaris Papua Barat**

Tabel III.18 Data Notaris Papua Barat

NO.	WILAYAH KERJA	NAMA NOTARIS
1.	Kota Sorong	1. Abdul Ro`Uf, S.H. 2. Imelda Florance Solissa, Sh., M.Kn, S.H. 3. Tiur Tamara, S.H., M.Kn. 4. Christina Ela Yonatan., SH., M.Kn 5. Nova Arifin., SH., M.Kn 6. Bernadeta Rum Riviani., SH., M.Kn 7. Irnawati Nasar., SH., M.Kn 8. Yenny Seliwaty Siagian., SH., M.Kn 9. Christy Rezy Roring., SH., M.Kn 10. Meliana Rumuy., SH., M.Kn 11. Yoseph Pieter Ipsan., SH., M.Kn 12. Irianto., SH., M.Kn 13. Fitriani., SH., M.Kn 14. Novelinda Saldy., SH., M;Kn 15. Christin Sasauw., SH., M.Kn 16. Muhammad Akbar., SH., M.Kn
2.	Kabupaten Sorong	1. Irin Siam Musnita., SH., M.Kn 2. Christy Simanjuntak., SH., M.Kn 3. Yonatan Ciputra Widjaja., SH., M.Kn 4. Retna Purbawaty., SH., M.Kn 5. Daniela., SH., M.Kn

		6. Monalisa Rahmat, Sh., M.Kn 7. Fitriana, SH., M.Kn 8. Dhanica, SH., M.Kn 9. Dewi, SH., M.Kn
3.	Kabupaten Kaimana	1. Abdul Wahab Wajo., SH., M.Kn
4.	Kabupaten Fak-Fak	1. Yoseph Iriantc Widiabrata., SH., M.Kn
5.	Kabupaten Raja Ampat	1. Muhammad Faqih Mursyid., SH., M.Kn
6.	Kabupaten Teluk Bintuni	1. Margareth Sri Febriani Beda., SH., M.Kn 2. Joanna Ela Yulia., SH., M.Kn
7.	Kabupaten Manokwari	1. Purwanto., SH., M.Kn 2. Suyanto., SH., M.Kn 3. Priyo Handoko., SH., M.Kn 4. Rachel Indrasary Sidabutar., SH., M.Kn 5. Ita Dameria Sihotang., SH., M.Kn 6. Lience, SH., M.Kn 7. Novie Hersanty., SH., M.Kn 8. Christin., SH., M.Kn

Pencapaian Output tersebut sebagai pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat. Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi dalam pencapaian kinerja ini antara lain :

- Kurangnya tenaga / pegawai pada Divisi pelayanan Hukum dan HAM;
- Kurangnya komitmen bersama dalam pelaksanaan kegiatan;
- Lambatnya respon dari instansi terkait;
- Terbatasnya maksimum pencairan.

## SASARAN KEGIATAN 5

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Terselenggaranya pelayanan kekayaan intelektual yang berkualitas di kantor wilayah kementerian hukum dan HAM</i>	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah
	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah (2) Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah.



## 1) Jumlah Permohonan Ki Yang Difasilitasi Kantor Wilayah

Dalam rangka peningkatan permohonan Kekayaan Intelektual di wilayah, upaya yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam memberikan layanan fasilitasi pendaftaran Kekayaan Intelektual terhadap 8 layanan Kekayaan Intelektual adalah dengan melibatkan pemerintah daerah baik ditingkat Provinsi maupun Kabupaten/ Kota serta lembaga terkait di Papua Barat. Pelibatan unsur Pemerintah Daerah dan lembaga terkait merupakan bentuk implementasi kerja sama Kekayaan Intelektual. Adapun pelibatan unsur tersebut adalah dengan :

- Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak - Fak ;
- Dinas Koperasi dan UKM Kota Sorong ;
- Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Manokwari ;
- Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Manokwari ;
- Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat ;
- Dewan Kesenian Tanah Papua Provinsi Papua Barat .

### a. Capaian

Tabel III.19 Indikator Kinerja Kegiatan Capaian Program Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	7 Layanan	5 Layanan	71%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah})}{\Sigma (\text{Target Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (5)}{\Sigma (7)} \times 100\% = 71 \%$$

Tabel III.20 Perbandingan Capaian Program Kekayaan Intelektual dengan Tahun Sebelumnya

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	7 Layanan	5 Layanan	<b>71 %</b>
<b>2021</b>	Jumlah permohonan KI yang difasilitasi kantor wilayah	6 Layanan	3 Layanan	<b>50 %</b>

Masyarakat Provinsi Papua Barat memiliki kecenderungan untuk mendaftarkan Kekayaan Intelektual pada 3 bentuk layanan Kekayaan Intelektual antara lain Hak Cipta, Merek, Paten. Pada tahun 2022 melalui sosialisasi, promosi yang dilakukan membuat peningkatan menjadi 5 layanan.

Di sisi lain juga terdapat peningkatan jumlah pendaftaran atas layanan pendaftaran Kekayaan Intelektual dimana pada tahun 2021 sebanyak 304 permohonan pendaftaran menjadi 335 permohonan pendaftaran pada tahun 2022 atau sebesar 1,1 %.

$$\begin{aligned} \% &= \frac{335}{304} \times 100 \% \\ &= 1,1 \% \end{aligned}$$

#### **b. Faktor Keberhasilan**

Target Capaian Indikator tahun 2022 adalah sebanyak 7 dari 8 layanan Kekayaan Intelektual yang meliputi layanan :

1. Hak Cipta ;
2. Merek ;
3. Paten ;
4. Desain Industri ;
5. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu ;
6. Rahasia Dagang ;
7. Indikasi Geografis ;
8. Kekayaan Intelektual Komunal.

Dan berdasarkan kondisi riil permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual yang telah dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat adalah sebanyak 5 layanan Kekayaan Intelektual, antara lain :

1. Hak Cipta sebanyak 298 pendaftaran ;
2. Merek sebanyak 23 pendaftaran ;
3. Paten Sederhana sebanyak 1 pendaftaran;
4. Indikasi Geografis sebanyak 1 pendaftaran ;
5. Kekayaan Intelektual Komunal sebanyak 12 pendaftaran.

Adapun jumlah permohonan pendaftaran Kekayaan Intelektual adalah sebanyak 335 permohonan pendaftaran.

Tabel III.21 Jumlah Permohonan Kekayaan Intelektual Tahun 2021 – 2022

No.	Jenis Kekayaan Intelektual	Jumlah Permohonan		Keterangan
		2021	2022	
1.	Hak Cipta	286	298	Jumlah Permohonan Meningkat dari Tahun sebelumnya
2.	Merek	15	23	
3.	Paten (Sederhana)	3	1	
4.	Desain Industri	-	-	
5.	Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	-	-	
6.	Rahasia Dagang	-	-	
7.	Indikasi Geografis	-	1	
8.	Kekayaan Intelektual Komunal	-	12	
Jumlah		304	335	

## 2. Jumlah Pelaksanaan Diseminasi Dan Promosi Kekayaan Intelektual Oleh Kantor Wilayah

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang Kekayaan Intelektual, maka pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah melaksanakan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual bersama Pemerintah Provinsi, Kabupaten/ Kota serta instansi terkait lainnya sebanyak 8 kegiatan yang dilaksanakan pada 4 tempat, antara lain;

- a. Kabupaten Manokwari;
- b. Kabupaten Kaimana;
- c. Kabupaten Raja Ampat;
- d. Kota Sorong.

### a. Capaian

Tabel III.22 Capaian Indikator Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI})}{\Sigma (\text{Target Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (4)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 400\%$$

Tabel III.23 Perbandingan Capaian Indikator pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	4 Lokus	400%
2021	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 Lokus	3 Lokus	300%
2020	Jumlah pelaksanaan diseminasi dan promosi kekayaan intelektual oleh kantor wilayah	1 stakeholder	9 Pemohon	150 %

Capaian target kinerja tahun 2022 tentang Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual oleh kantor wilayah adalah dilaksanakannya kegiatan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual pada 1 lokus atau tempat dengan melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota, dimana pada kenyataannya Capaian Kinerja tahun 2022 mengalami peningkatan pada 4 lokus atau 4 tempat pelaksanaan kegiatan.

#### b. Analisa

Dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 telah dilaksanakan kegiatan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual sebanyak 8 kali kegiatan pada empat tempat kegiatan yakni di Kabupaten Manokwari, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Raja Ampat dan Kota Sorong.

Tabel III.24 Jumlah Pelaksanaan Diseminasi dan Promosi Kekayaan Intelektual Tahun 2022

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi kegiatan
1.	Promosi dan Diseminasi KIK	17 Februari 2022	Kabupaten Kaimana
2.	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta	10 Maret 2022	Kabupaten Manokwari
3.	Promosi dan Diseminasi KIK	20 April 2022	Kabupaten Raja Ampat
4.	Mobile Intelektual Property Clinic/ Klinik KI Bergerak	20 s/d 22 Juni 2022	Kota Sorong
5.	DJKI Mengajar	28 September 2021	Kabupaten Manokwari
6.	Promosi dan Diseminasi KIK	09 September 2022	Kota Sorong
7.	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta	09 Desember 2022	Kabupaten Manokwari
8.	Promosi dan Diseminasi Hak Cipta	12 Desember 2022	Kabupaten Manokwari

## SASARAN KEGIATAN 6

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
<i>Terselenggaranya Penegakan Hukum di Bidang Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM yang Handal</i>	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah
	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual (2) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah (3) Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

### 1) Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Dalam rangka Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang merupakan Target Kinerja Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat 1 penanganan pengaduan pelanggaran Kekayaan Intelektual yaitu Pendampingan Penanganan Gugatan Lambang Daerah Provinsi Papua Barat di Pengadilan Niaga Makassar dan dapat ditangani dengan baik dengan baik.

#### a. Capaian

Tabel III.25 Capaian Indikator Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran KI})}{\Sigma (\text{Target Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (100)}{\Sigma (100)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.26 Perbandingan Capaian Indikator Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	100%	100%
2021	Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual	100%	0	0%
2020	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	3 Data KI Komunal	300 %

Capaian target kinerja tahun 2022 tentang Persentase Penanganan Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual oleh Kantor Wilayah yang dalam target nya sebesar 100 % dapat dipenuhi berupa penanganan Gugatan Lambang Daerah Provinsi Papua Barat di Pengadilan Niaga Makassar yang diajukan oleh masyarakat an. Pieter Mambor.

#### **b. Analisa**

Dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 terpenuhi capaian target dimaksud dikarenakan adanya penanganan Gugatan Lambang Daerah Provinsi Papua Barat di Pengadilan Niaga Makassar yang diajukan oleh masyarakat.

### **2) Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang Dilakukan Oleh Kantor Wilayah**

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang perlindungan atas pelanggaran Kekayaan Intelektual, maka pada tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah melaksanakan kegiatan Edukasi Tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dengan Instansi/ Lembaga Terkait bekerjasama dengan :

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat ;
2. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) Papua Sorong (Anggaran STIKES Papua Sorong) ;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Fak – fak (Anggaran Pemda Kabupaten FakFak).

#### **a. Capaian**

Tabel III.27 Capaian Indikator Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})}{\Sigma (\text{Target Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 300\%$$

Tabel III.28 Perbandingan Capaian Indikator Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	3 Kegiatan	300%
<b>2021</b>	Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang Dilakukan oleh Kantor Wilayah	1 Kegiatan	1 Kegiatan	100%
<b>2020</b>	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	3 Data KI Komunal	300 %

Capaian kinerja tahun 2022 tentang Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Yang dilakukan Oleh Kantor Wilayah yang dalam target sebesar 1 kegiatan dapat terpenuhi dengan baik, dimana telah dilaksanakan sebanyak 3 kegiatan.

#### **b. Analisa**

Dalam pemenuhan capaian kinerja tahun 2022 diatas dengan melakukan kerja sama stake holder di Provinsi Papua Barat yakni Kepolisian Daerah Provinsi Papua Barat dengan melaksanakan kegiatan Edukasi tentang Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual Dengan Instansi Terkait sebanyak 3 kali kegiatan

### **3) Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual Di Wilayah**

Dalam rangka Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah melaksanakan 3 kali kegiatan Sosialisasi Pemantauan/ Pengawasan di Bidang Kekayaan Intelektual Dengan Instansi

Terkait dengan melakukan sinergi Bersama Aparat Penegak Hukum serta intansi terkait di Provinsi Papua Barat.

**a. Capaian**

Tabel III.29 Capaian Indikator Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	3 Laporan	150%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})}{\Sigma (\text{Target Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Pencegahan Pelanggaran KI})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (3)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 300 \%$$

Tabel III.30 Perbandingan Capaian Indikator Kegiatan Pemantauan Produk KI

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	3 Laporan	150%
2021	Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah	2 Laporan	2 Laporan	100%
2020	Jumlah pelaksanaan kegiatan pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual yang dilakukan oleh kantor wilayah	2 lokus	3 Data KI Komunal	300 %

Capaian target kinerja tahun 2022 tentang Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah yang dalam targetnya sebanyak 2 laporan dapat dipenuhi sesuai dengan banyaknya kegiatan yang telah dilaksanakan.

**b. Analisa**

Dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 dilakukan dengan bekerja sama dengan Aparat Penegak Hukum dan Instansi terkait di Provinsi Papua Barat.

Tabel III.31 Kegiatan Pemantauan Produk Kekayaan Intelektual di Wilayah

No.	Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan
1.	Edukasi Pencegahan dan Pelanggaran KI Dengan Instansi Terkait	20 Mei 2022	Kabupaten Manokwari
2.	Sosialisasi Pemantauan/ Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual	15 September 2022	Kabupaten Manokwari



3.	Sosialisasi Pemantauan/ Pengawasan Bidang Kekayaan Intelektual	17 November 2022	Kabupaten Manokwari
----	--	------------------	---------------------

Dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat tentang Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah dengan melaksanakan kegiatan – kegiatan yang terdapat dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Tahun Anggaran 2022.

Capaian target kinerja tahun 2022 tentang Kegiatan Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah Dengan capaian kinerja input atau penyerapan anggaran tersebut diatas, maka capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat masuk dalam kategori baik yang mencapai target yang telah ditentukan pada awal tahun 2022. Capaian kinerja ini disumbangkan oleh kinerja pada Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual pada kegiatan Layanan Kekayaan Intelektual yang telah diselesaikan tepat waktu dan sesuai standar. **Dari anggaran sebesar Rp. 1.059.908.000 ,- (Satu Milyar Lima Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Ribu Rupiah) dapat direalisasi sebesar Rp. 1.035.003.350 ,- (Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Tiga Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah) atau sebesar 97,65 %**

$$\begin{aligned} \% &= 1.035.003.350 / 1.059.908.000 \times 100 \% \\ &= 97,65 \% \end{aligned}$$

Dalam pemenuhan target kinerja tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan pedoman pada Rencana Kerja Anggaran Kementerian/ Lembaga Sub Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual. Walaupun **pencapaian dari sisi kuantitas penyerapan anggaran pada Tahun 2022 belum mencapai 100% yaitu sebesar 97,65 %**, namun demikian apabila dinilai dari kualitas kegiatan hampir seluruh kegiatan pada tahun 2022 yang diprogramkan dapat dilaksanakan dengan baik. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk pencapaian sasaran dan peningkatan kinerja organisasi di masa yang akan datang di antaranya adalah:

1. Melakukan kegiatan Penyelesaian Permohonan HKI Sesuai dengan Peraturan terkait dengan :
  - a. Menyelesaikan Penerimaan Permohonan HKI ;
  - b. Koordinasi Dengan Unit Pusat.

2. Melakukan kegiatan Promosi dan Diseminasi Kekayaan Intelektual, diantaranya yaitu :
  - a. Sosialisasi tentang Promosi dan Diseminasi KI ;
  - b. Mendampingi Pengajuan Permohonan KI.
3. Melakukan kegiatan Penyediaan Data Kekayaan Intelektual Komunal, diantaranya yaitu :
  - a. Inventarisasi Kekayaan Intelektual Komunal ;
  - b. Mendampingi Pengajuan Permohonan KI.
4. Melaksanakan kegiatan pencegahan pelanggaran HKI di Wilayah, diantaranya yaitu :
  - a. Sosialisasi tentang Pelanggaran KI ;
  - b. Pemantauan dan Pengawasan Pencegahan Pelanggaran KI.
5. Pengaduan Pelanggaran HKI di Wilayah :
  - a. Penanganan Penyelesaian Sengketa KI melalui proses mediasi ;
  - b. Pendampingan Penanganan Pelanggaran KI baik pidana maupun perdata di pengadilan.
6. Pengawasan Indikasi Geografis Terdaftar :
  - a. Pendampingan Pengajuan Permohonan IG ;
  - b. Mengawasi Indikasi Geografis terdaftar.

## SASARAN KEGIATAN 7

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator kinerja Kegiatan</b>
<i>Terfasilitasinya rancangan produk hukum di daerah</i>	Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

### 1) Presentase Rancangan Perda Yang Difasilitasi Oleh Kantor Wilayah Kemenkumham

### a. Capaian

Tabel III.32 Capaian Indikator Presentase Ranperda yang difasilitasi

Indikator	Target	Realisasi	Capaian
Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	120%	150%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Presentase Rancangan perda yang difasilitasi})}{\Sigma (\text{Target Presentase Rancangan perda yang difasilitasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (120)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 1500 \%$$

Tabel III.33 Perbandingan Capaian Indikator Presentase Ranperda yang difasilitasi

Tahun	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	120%	150%
<b>2021</b>	Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	80%	72%	90%
<b>2020</b>	Presentase Rancangan perda yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kemenkumham	15 Ranperda	15 Ranperda	100%

Adapun target kinerja Fasilitasi Kegiatan Pengharmonisasian Produk Hukum Daerah tahun 2022 yaitu sebanyak 20 Rancangan Peraturan Daerah sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 antara Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan. Dari target tersebut telah diselesaikan sebanyak 30 Rancangan Peraturan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

1. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Keanggotaan dan Jumlah Anggota, Tugas dan wewenang serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Majelis Rakyat Papua Barat;
2. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota yang diangkat dari Unsur Orang Asli Papua;

3. Rancangan Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat tentang Pembagian, Pengelolaan dan Penatausahaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Minyak Bumi dan Gas Alam Dalam Rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;
4. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Distrik;
5. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Rekrutmrn Politik di Provinsi Papua Barat;
6. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Orang Asli Papua;
7. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
9. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara;
10. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah;
11. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Daerah;
12. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Distrik Aimasi, Distrik Wokwan, Distrik Masni Utara, Distrik Masirawi, serta Distrik Moruj Mega Dalam Wilayah Kabupaten Manokwari;
13. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pengelolaan Air Limba Domestik;
14. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Pembinaan dan Penataan Pasar Rakyat Pusat Perbelanjaan dan Tokoh Swalayan;
15. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama tentang Tata Kelolah Penyelenggaraan Pendidikan;
16. Rancangan Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2022- 2042;
17. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rencana Tata Ruang Ewilayah Kabupaten Kaimana Tahun 2022-2041;

18. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Kaimana Tahun 2022-2025;
19. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perseroan Terbatas Bank Papua;
20. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah Kabupaten Sorong;
22. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin;
23. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Pengamanan Objek Vital dan Fasilitas Publik;
24. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Perlindungan Tenaga Kerja Lokal Orang Asli Papua;
25. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Penyelenggaraan Reklame;
26. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;
27. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sorong Tahun 2022-2041;
28. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sorong tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Sorong 2022-2025;
29. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
30. Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung;

Pencapaian indikator diukur dari jumlah peraturan perundang-undangan yang telah selesai melalui tahapan penyusunan, pengharmonisasian, pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, hingga pengundangan peraturan daerah dibandingkan dengan jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang ditargetkan. Semakin tinggi jumlah Rancangan Peraturan Daerah yang dapat diselesaikan menjadi Peraturan Daerah menunjukkan bahwa perencanaan yang disusun dalam Program Legislasi Daerah dapat

dilaksanakan dan diselesaikan sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **b. Analisa**

Pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d) Peraturan Pemerintah;
- e) Peraturan Presiden;
- f) Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam capaian indikator kinerja kegiatan, Kantor Wiayah melakukan Fasilitasi Hamonisasi Perancangan Peraturan Daerah pada bulan Februari sampai dengan Desember 2022 yang dilaksanakan baik di Kantor Wilayah maupun di Biro hukum Provinsi atau di Bagian Hukum Kabupaten/Kota.

Harmonisasi rancangan peraturan daerah mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:

- a) Pengharmonisasian materi muatan rancangan peraturan daerah/ peraturan kepala dengan:
  - (1). Pancasila;
  - (2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1944;
  - (3). Undang-undang;
  - (4). Asas-asas peraturan perundang-undangan;
  - (5). Asas pembentukan;

- (6). Asas materi muatan; dan
  - (7). Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan peraturan daerah yang bersangkutan.
- b) Pengharmonisasian rancangan peraturan daerah dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi:
- Kerangka peraturan perundang-undangan;
  - Hal-hal khusus;
  - Ragam bahasa; dan
  - Bentuk rancangan peraturan perundang-undangan.

## SASARAN KEGIATAN 8

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<b>Indikator kinerja Kegiatan</b>
<i>Terselenggaranya pembinaan perancang peraturan perundang-undangan</i>	Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan

### 1) Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan

#### a. Capaian

Sebanyak 7 orang JFT Perancang Peraturan Perundang-undangan mengikuti pembinaan perancang peraturan perundang-undangan.

Tabel III.34 Capaian Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan

Indikator kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
----------------------------	--------	-----------	---------

<b>Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan</b>	7 Orang	7 Orang	100%
--	---------	---------	------

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi peningkatan kapasitas pembinaan})}{\Sigma (\text{Target peningkatan kapasitas pembinaan})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (7)}{\Sigma (7)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.35 Perbandingan Capaian Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan

Indikator	Target			Realisasi			Capaian		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
<b>Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga Prancang Peraturan Perundang-Undangan</b>	7	7	7	7	7	7	100%	100%	100%

#### a. Analisa

##### 1) Penilaian Angka Kredit

Pada tahun 2022 Kantor Wilayah tidak melakukan kegiatan Penilaian Angka Kredit karena belum memiliki Tim Penilai di Daerah, sehingga dalam pelaksanaan penilaian perlu mengundang Tim Penilai dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan yang membutuhkan anggaran cukup tinggi. Selain itu tahun 2022 tidak terdapat JFT Perancang yang akan melakukan penilaian angka kredit.

##### 2) Forum Pendalaman Materi

Forum Pendalaman Materi dilaksanakan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 23 Juni 2022

Waktu : 09.00 Wit s/d selesai

Materi yang disajikan yaitu:

- a. Sosialisasi Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang 12 Tahun 2011;
- b. Organisasi Tim Penilai Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang - Undangan;



- c. Pemahaman Permenkumham 5 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Penilaian Angka Kredit Perancang Peraturan Perundang-Undangan;  
Materi ini disampaikan oleh narasumber yang berasal dari Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan.

**Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Dilakukan.**

Keberhasilan target kinerja yang mencapai 100% disebabkan beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah baik di bagian hukum maupun di lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 2) Dibuka kembali larangan nerkumpul dalam jumlah banyak/ PPKM dari pemerintah sehingga mendukung rapat-rapat pengharmonisasian dilaksanakan; dan
- 3) Mulai meningkatnya pemahaman pemerintah daerah terkait peran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM dalam hal pengharmonisasian rancangan peraturand daerah/peraturan kepala daerah.

**SASARAN KEGIATAN 9**

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<i>Terselenggaranya pembinaan hukum di wilayah</i>	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

**1) Jumlah Kegiatan Perencanaan Pembentukan Dan Pemantauan Produk Hukum Daerah**

## a. Capaian

Tabel III.36 Capaian Indikator Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah kegiatan perencanaan})}{\Sigma (\text{Target Jumlah kegiatan perencanaan})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (2)}{\Sigma (2)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.37 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2021	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2021	Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah	2 Kegiatan	2 Kegiatan	100%
2020	Terselenggaranya kegiatan perencanaan pembentukan produk hukum daerah	1 kanwil	1 kanwil	100%

## b. Analisa

Pada tahun 2022 dengan indikator kinerja Jumlah kegiatan perencanaan pembentukan dan pemantauan produk hukum daerah sebanyak 2 kegiatan telah terlaksana 100%, sebagai berikut:

### 1. Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum.

Analisa dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan.

Adapun bahwa Peraturan Daerah khusus tersebut perlu disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan PP 106 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua sehingga rekomendasi dari kegiatan ini yaitu Perdasus tersebut perlu diubah atau dibuat baru karena materinya 50 % telah berubah.

2. Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik.  
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari tentang Pembentukan Perseroan Daerah Mambruk Karya Mandiri.
3. Fasillitasi Penyusunan Prolegda.  
Yaitu memfasilitasi penyusunan prolegda kabupaten/kota di provinsi Papua Barat.

## SASARAN KEGIATAN 10

<b>SASARAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>
<i>Terwujudnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat di wilayah</i>	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan
	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum
	Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah
	Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan lima indikator kinerja yaitu (1) Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan (2) Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan (3) Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum (4) Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah (5) Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

### **1) Persentase Permohonan Bantuan Hukum Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan**

## a. Capaian

Tabel III.38 Capaian Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %	92,8%	114%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase permohonan bantuan hukum litigasi})}{\Sigma (\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum litigasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (92.8)}{\Sigma (81)} \times 100\% = 114 \%$$

Tabel III.39 Perbandingan Capaian Indikator Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	81 %	92,8%	114%
<b>2021</b>	Persentase permohonan bantuan hukum litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	77 %	48%	62%
<b>2020</b>	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi	45 orang	35 orang	77.8%

## b. Analisa

Penyelenggaraan bantuan hukum kepada orang/kelompok orang miskin di Provinsi Papua Barat dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum yang telah terakreditasi dan terverifikasi antara lain :

- Perhimpunan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian Sorong di Kota Sorong Provinsi Papua Barat ;
  - Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Papua Barat (Posbakum Adin Papua Barat) di Kabupaten Manokwari.
  - Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia Sorong (Posbakum Adin Sorong) di Kota Sorong Provinsi Papua Barat ;
  - Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kamasan (YLBH Kamasan) di Kota Sorong Provinsi Papua Barat ;
  - Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH Peradi) di Kota Sorong
- Pada tahun 2022, pelaksanaan bantuan hukum cukup baik dan telah memenuhi target capaian kinerja dengan target sebesar 81 % dan terlaksana 92,8% dikarenakan beberapa

OBH telah memenuhi anggaran yang diberikan. Akan tetapi masih terdapat beberapa kendala di masing – masing OBH sebagai berikut:

1. Adanya 1 (satu) PBH yang tidak melakukan kontrak pelaksanaan bantuan hukum sehingga selama satu tahun tidak menyerap anggaran bantuan hukum;
2. Adanya 1 (satu) PBH baru yang tidak mengetahui adanya evaluasi anggaran setiap triwulan sehingga anggaran terpotong dikarenakan kurangnya penyerapan pada semester I;
3. PBH masih belum menyerap anggaran non litigasi secara optimal

Berikut data OBH yang telah memberikan bantuan hukum kepada Orang / Kelompok orang miskin pada tahun 2022 :

Tabel III.40 Data OBH telah memberikan Bantuan Hukum Litigasi

NO	Nama OBH	Litigasi			
		Pagu	Realisasi	%	Jumlah Kasus
1	PBHKP Kota Sorong	45.000.000,-	45.000.000,-	100 %	16
2	Posbakum Adin Papua barat	49.000.000,-	49.000.000,-	100%	21
3	Posbakum Adin Sorong	49.000.000,-	49.000.000,-	100%	18
4	YLBH - Kamasan	13.000.000,-	0,-	0%	0
5	PBH Peradi	25.000.000,-	25.000.000,-	100%	9
<i>Jumlah</i>		<b>181.000.000,-</b>	<b>168.000.000,-</b>	<b>92,8%</b>	<b>74</b>

## 2) Persentase Permohonan Bantuan Hukum Non Litigasi Yang Dilayani Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan.

### a. Capaian

Tabel III.41 Capaian Indikator Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	46,5%	58%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi})}{\Sigma (\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (46,5)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 58 \%$$

Tabel III.42 Perbandingan Capaian Indikator Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	80 %	46,5%	58%
2021	Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi yang dilayani sesuai dengan peraturan perundang-undangan	79 %	0%	0%
2020	Jumlah kegiatan bantuan non litigasi kepada orang atau Kelompok masyarakat miskin	5 kegiatan	2 kegiatan	40%

### b. Analisa

Pelaksanaan bantuan hukum non litigasi pada tahun 2022 telah dilaksanakan oleh beberapa PBH dikarenakan beberapa PBH lainnya terlalu focus pada kasus – kasus litigasi sehingga belum memenuhi target sebanyak 80% dan hanya terlaksana 46,5%. Serta, terdapat pengalihan anggaran non litigasi pada semester I sehingga beberapa OBH hanya dapat mengajukan bantuan hukum non litigasi setelah adanya *refocusing* anggaran. Berikut data capaian pelaksanaan bantuan hukum Non Litigasi tahun 2022 :

Tabel III.43 Data OBH telah memberikan Bantuan Hukum Non Litigasi

NO.	Nama OBH	Non Litigasi			
		Pagu	Realisasi	%	Jumlah Kasus
1.	PBHKP Kota Sorong	3.200.000,-	3.200.000,-	100	4
2.	Posbakum Adin Papua barat	3.200.000,-	0,-	0	0
3.	Posbakum Adin Sorong	3.200.000,-	0,-	0	0
4.	YLBH - Kamasan	3.200.000,-	0,-	0	0
5.	PBH Peradi	5.170.000,-	5.170.000,-	100	5
<i>Jumlah</i>		<b>17.970.000,-</b>	<b>8.370.000,-</b>	<b>46,5</b>	<b>9</b>

Melihat hasil capaian penyerapan anggaran kegiatan Non Litigasi dimana masih sangat rendah penyerapan anggaran dimaksud diakibatkan masih tingginya tingkat penanganan perkara litigasi yang dilakukan oleh OBH dibandingkan kegiatan non litigasi sehingga hal ini juga menjadi tugas dan kewajiban Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah di tahun 2023 untuk mendorong OBH dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi. Pada beberapa kesempatan Monitoring dan Evaluasi atau Verifikasi Lapangan,

Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum Daerah sudah memberikan saran dan masukan serta dorongan kepada OBH dalam pelaksanaan bantuan hukum non litigasi.

### 3) Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

#### a. Capaian

Tabel III.44 Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61%	56%	73%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi})}{\Sigma (\text{Target Persentase permohonan bantuan hukum non litigasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (56)}{\Sigma (76,61)} \times 100\% = 73 \%$$

Tabel III.45 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61%	56%	73%
2021	Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum	76,61%	50,43%	65,8%

#### b. Analisa

Indeks Kepuasan Layanan Bantuan Hukum didapatkan dari kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pemberian Bantuan Hukum. Pengawasan pelaksanaan bantuan hukum di wilayah dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan melakukan monitoring dan evaluasi pemberian bantuan hukum. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan dengan memberikan kuisisioner kepada penerima bantuan hukum untuk mengetahui pelayanan Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang diberikan kepada masyarakat/ kelompok masyarakat miskin. Pada tahun 2022, Monev dilaksanakan 2 (dua) kali antara lain:

##### a. Monev di Lapas Kelas II B Manokwari

Monev dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum yang diwakili oleh Pengelola Bantuan Hukum pada tanggal 04 November 2022. Tim memberikan kuisisioner untuk diisi oleh 8 (delapan) orang warga binaan sebagai

perwakilan penerima bantuan hukum dari OBH Posbakum Adin Papua Barat. Tim juga melakukan wawancara kepada yang bersangkutan, namun informasi yang di peroleh bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui bahwa telah mendapat pendampingan hokum dari OBH tersebut. Selain itu dari petugas Lapas Kelas IIB Manokwari juga menginformasikan hal yang sama bahwa OBH tersebut tidak pernah datang ke Lapas untuk melakukan pendampingan kepada klien yang bersangkutan.

b. Monev di Lapas kelas II B Sorong

Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan bantuan hukum juga dilaksanakan di Lapas Kelas II B Sorong pada tanggal 08 November 2022 oleh Panitia Pengawas Pelaksanaan Bantuan Hukum dengan memberikan kuisisioner kepada warga binaan sejumlah 11 (sebelas) orang, 7 (tujuh) orang warga binaan perwakilan penerima bantuan hukum dari Posbakum Adin Sorong, 4 (empat) orang perwakilan penerima bantuan hukum dari PBHKP Sorong, dan 5 (lima) orang perwakilan penerima bantuan hukum dari PBH Peradi Sorong. Selain memberikan kuisisioner, Tim juga melakukan wawancara beberapa pertanyaan terkait pelayanan OBH dalam hal pendampingan hukum. Hal sama pun terjadi di Sorong dengan tidak adanya pendampingan hukum dari OBH, akan tetapi ada beberapa warga binaan juga menyampaikan mendapatkan pendampingan hukum dari advokat yang terdaftar di OBH. Hal ini segera kami tindak lanjuti pada saat pelaksanaan verifikasi lapangan di OBH di Sorong, untuk menanyakan kendala pendampingan hukum kepada warga binaan.

Hasil pelaksanaan monev di kedua Lapas di atas, dilakukan penginputan pengisian kuisisioner pada aplikasi SID Bankum oleh Tim dan kami sampaikan pula kepada tim Pusat sebagai pertimbangan akreditasi OBH.

Tabel III.46 Hasil Kuisisioner OBH pada Aplikasi SID Bankum

No	Nama	OBH	Tanggal	Nilai
1	Aldo Disyon	Posbakum Adin PB	04 November 2022	75
2	Zet Yonatan Kusaly	Posbakum Adin PB	04 November 2022	66
3	Rudi setiawan	Posbakum Adin PB	04 November 2022	62
4	Rifai	Posbakum Adin PB	04 November 2022	71
5	Brilen Sapulete	Posbakum Adin PB	04 November 2022	43
6	Daud Untung Tandirerung	Posbakum Adin PB	04 November 2022	70
7	Lius Juliani Sabandafa	Posbakum Adin PB	04 November 2022	38



8	Lambert Wanma	Posbakum Adin PB	04 November 2022	24
9	Novem Masly salakay	PBH Peradi	08 November 2022	68
10	Antonius Yekerebun	PBH Peradi	08 November 2022	64
11	Yiki yadatrat	PBH Peradi	08 November 2022	40
12	Pahira Tahir	PBH Peradi	08 November 2022	43
13	David Yosep Yaisamon	PBH Peradi	08 November 2022	71
14	Alfret sarury	PBHKP	08 November 2022	49
15	Martinus Kafroly	PBHKP	08 November 2022	58
16	Muhammad Idris Rajab	PBHKP	08 November 2022	30
17	Econ Obure	PBHKP	08 November 2022	32
18	Habel Jimi Waromi	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	66
19	Ali Tuankota	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	56
20	Morendes Mesak Marani	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	70
21	Muhammad Syawalludin	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	65
22	Yusuf Boyratan	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	47
23	Andi Husein Ramadhan	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	75
24	Iwan Isir	Posbakum Adin Sorong	08 November 2022	61
Total Nilai				1344
Prosentasi				56%

#### 4) Persentase Desa Sadar Hukum Yang Terbentuk Di Masing – Masing Wilayah

##### a. Capaian

Tabel III.47 Capaian Indikator Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah	70%	80%	114%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah})}{\Sigma (\text{Target Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (80)}{\Sigma (70)} \times 100\% = 114\%$$

Tabel III.48 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di wilayah

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah	70%	80%	114%
2021	Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk di masing – masing wilayah	70%	-	0%

## b. Analisa

Persentase Desa Sadar Hukum yang terbentuk didapatkan dari kegiatan Fasilitasi Kelurahan/Desa Sadar Hukum dan kegiatan Penyuluhan Hukum. Pada tahun 2022, Fasilitasi Kelurahan /Desa Sadar Hukum sebagaimana DIPA Tahun Anggaran 2022 terdiri dari Pembinaan Kelurahan/Desa Sadar Hukum dan Pembentukan/Evaluasi Kelurahan/Desa Sadar Hukum. Pada tahun ini, Bidang Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah melaksanakan monitoring dan evaluasi kepada beberapa desa sadar hukum yang telah di resmikan, kami juga telah melaksanakan beberapa kali pembinaan Desa/Kelurahan Sadar Hukum sehingga telah terbentuk 2 (dua) Kelompok Kadarkum di Kampung Sotea dan 2 (dua) kelompok Kadarkum di Kampung Waseki Pop. Kedua desa telah di terbitkan SK Bupati Manokwari sebagai Desa/Kelurahan Binaan.

## 5) Persentase Anggota Jdihn Yang Berpartisipasi Aktif

### a. Capaian

Tabel III.49 Capaian Indikator Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	65%	325 %

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif})}{\Sigma (\text{Target Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (65)}{\Sigma (20)} \times 100\% = 325\%$$

Tabel III.50 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	65%	325 %
2021	Persentase Anggota JDIHN yang berpartisipasi aktif	20%	57,14%	285 %

### b. Analisa

Anggota JDIHN di Provinsi Papua Barat yang telah terintegrasi sebagai berikut:

Tabel III.51 Anggota JDIHN di Provinsi Papua Barat yang telah terintegrasi

Instansi	Jumlah	Website JDIH	Integrasi dgn jdihn.go.id
Biro Hukum Pemerintah Provinsi	1	1	1
Bagian Hukum Kabupaten	12	12	12
Bagian Hukum Kota	1	1	1
DPRD Provinsi	1	0	0
DPRD Kabupaten	12	6	6
DPRD Kota	1	1	1
Perpustakaan Hukum	4	0	0
Jumlah	32	21	21
Persentase	100%	65%	65%

## SASARAN KEGIATAN 11

### Sasaran Kegiatan

Meningkatnya pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

### Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM  
Jumlah kab/kota peduli HAM

Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan lima indikator kinerja yaitu (1) Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM (2) Jumlah kab/kota peduli HAM (3) Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

### 1) Jumlah Pemerintah Daerah Yang Melaksanakan Program Aksi Ham

#### a. Capaian

Tabel III.52 Capaian Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Pemerintah Daerah	6 Pemerintah Daerah	300%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah pemerintah daerah melaksanakan program aksi HAM})}{\Sigma (\text{Target Jumlah pemerintah daerah melaksanakan program aksi HAM})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (6)}{\Sigma (2)} \times 100\% = 300\%$$

Tabel III.53 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Pemerintah Daerah	6 Pemerintah Daerah	300%
2021	Jumlah pemerintah daerah yang melaksanakan program aksi HAM	2 Intansi Pemerintah	1 Intansi Pemerintah	50%
2020	Jumlah Pemerintah Daerah yang melaksanakan aksi HAM	3 Instansi Pemerintah	3 Instansi Pemerintah	100 %

HAM

## b. Analisa

- Pelaporan Aksi HAM yang disampaikan oleh Provinsi Papua Barat, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten Tambrauw
- Masih kurangnya pelaksanaan bimbingan teknis substansi Aksi HAM (bentuk pengisian pelaporan) terutama kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga banyak pelaporan yang belum sesuai; dan
- Masih terdapat kendala geografis pada daerah tertentu yang belum memiliki jaringan internet yang memadai untuk dapat mengakses sistem pemantauan KSP.

## 2) Jumlah Kab/Kota Peduli Ham

### a. Capaian

Tabel III.54 Capaian Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Pemerintah Daerah	2 Pemerintah Daerah	200%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah kab/kota peduli HAM})}{\Sigma (\text{Target Jumlah kab/kota peduli HAM})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (2)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 200 \%$$

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Intansi Pemerintah	2 Intansi Pemerintah	200%
2021	Jumlah kab/kota peduli HAM	1 Instansi Pemerintah	-	0%

<b>2020</b>	Jumlah Kab/Kota Peduli HAM	1 Kab/ Kota	-	0 %
-------------	----------------------------	-------------	---	-----

Tabel III.55 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah kab/kota peduli HAM

### b. Analisa

Pada Tahun 2022 terdapat 2 Daerah yang telah menjadi kab/kota Peduli HAM yaitu Kabupaten Manokwari dan Fakfak. Kegiatan Kabupaten/Kota Peduli HAM telah dilaksanakan pada bulan April.

## 3) Jumlah Instansi Pemerintah Yang Menindaklanjuti Hasil Diseminasi Dan Penguatan Ham Melalui Pelayanan Publik Berbasis Ham

### a. Capaian

Tabel III.56 Capaian Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah Tindak Lanjut diseminasi HAM})}{\Sigma (\text{Target Jumlah Tindak Lanjut diseminasi HAM})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (1)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 100\%$$

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
-------	-------------------	--------	-----------	---------

<b>2022</b>	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	1 Instansi Pemerintah	100%
<b>2021</b>	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM	1 Instansi Pemerintah	2 Instansi Pemerintah	200%

Tabel III.57 PerbandinganCapaian Indikator Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM

## b. Analisa

Tercapainya Pelaksanaan hasil diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan publik berbasis HAM adalah berkat kerjasama Kantor Wilayah, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten se-Papua Barat.

## SASARAN KEGIATAN 12

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<i>Indikator Kinerja Kegiatan</i>
<i>Meningkatnya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah</i>	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

### 1) Tersedianya Rekomendasi Pelindungan Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah

#### a. Capaian

Tabel III.58 Capaian Indikator Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendasi	1 Rekomendasi	33%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Rekomendasi})}{\Sigma(\text{Target Rekomendasi})} \times 100\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (1)}{\Sigma(3)} \times 100\% = 33 \%$$

Tabel III.59 Perbandingan Capaian Indikator Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendas i	1 Rekomendas i	33%
2021	Tersedianya rekomendasi Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah	3 Rekomendas i	3 Rekomendas i	100%
2020	Jumlah instansi pemerintah yang menindaklanjuti hasil Diseminasi dan penguatan HAM melalui pelayanan public berbasis HAM	3 Rekomendas i	3 Rekomendas i	100 %

#### a. Analisa

Pada Tahun 2022 hanya terdapat 1 rekomendasi, menurun dari tahun sebelumnya. Itu kerna masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Pelindungan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia Di Wilayah. Kedepannya akan terus dilaksanakan Sosialisasi terkait Perlindungan dan Pemenuhan HAM di Wilayah.

## SASARAN KEGIATAN 13

### Sasaran Kegiatan

*Rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian*

### Indikator Kinerja Kegiatan

Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan



dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia

pengembangan hukum dan hak asasi manusia
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia (2) Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

### 1) Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan Hak Asasi Manusia

#### a. Capaian

Tabel III.60 Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Raelisasi	Capaian
Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Rekomendasi})}{\Sigma(\text{Target Rekomendasi})} \times 1000\%$$

$$\% = \frac{\Sigma (70)}{\Sigma(70)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III. 61 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Kajian Di Wilayah Sebagai Bahan Penelitian Dan Pengembangan Hukum Dan HAM

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%
2021	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	70%	70%	100%
2020	Persentase rekomendasi hasil kajian di wilayah sebagai bahan penelitian dan pengembangan hukum dan hak asasi manusia	1 Layanan	1 Layanan	100%

#### b. Analisa

Pada Tahun 2022 Target pada Indikator ini tercapai dengan baik melalui Kegiatan Kajian Hukum dan HAM di Wilayah dan Analisis Kebijakan dengan Pemamfaatan SIPKUMHAM yang mendukung pembuatan kebijakan di Wilayah dan Monev peningkatan kualitas IPK-IKM.

## 2) Hasil Penelitian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Yang Disosialisasikan Di Wilayah

### a. Capaian

Tabel III.62 Capaian Indikator Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Raelisasi	Capaian
Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Hasil Penelitian})}{\Sigma (\text{Target Hasil Penelitian})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (1)}{\Sigma (1)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.63 Perbandingan Capaian Indikator Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Raelisasi	Capaian
2022	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%
2021	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%
2020	Hasil penelitian hukum dan hak asasi manusia yang disosialisasikan di wilayah	1 Buku	1 Buku	100%

### b. Analisa

Pada tahun 2022 Kegiatan Sosialisasi Hasil Peneitian Hukum dan Ham telah dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2022 dengan narasumber Narasumber:

- 1) Eko Noer. K. SH. MH (Peneliti Madya Balitbang Hukum dan HAM
- 2) Dr. Henrikus Renjaan, S.H., LL.M (Akademisi/ Tenaga Ahli Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat)
- 3) Ruben Sabami, S.H (Praktisi Hukum)

## SASARAN KEGIATAN 14

### Sasaran Kegiatan

### Indikator Kinerja Kegiatan

<i>Terwujudnya Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat yang Berkualitas di Wilayah</i>	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah
---	--

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan satu indikator kinerja yaitu (1) Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah

### 1) Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah

#### a. Capaian

Tabel III.64 Capaian Indikator Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80%	100%	125%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Penyelenggaraan Masyarakat})}{\Sigma (\text{Target Indeks Penyelenggaraan Masyarakat})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (100)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 125\%$$

Tabel III.65 Perbandingan Capaian Indikator Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah

Tahun	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2022	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80%	100%	125%
2021	Indeks Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	80%	100%	125%

#### b. Analisa

Nilai Indeks penyelenggaraan masyarakat diambil dari 9 (sembilan) Indeks yang ada pada Unit Pelaksana Teknis yaitu;

- Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

- Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan
- Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan
- Indeks Pelayanan Tahanan
- Indeks Pengelolaan Basan Baran
- Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana
- Indeks Pemenuhan Hak Narapidana
- Indeks Pembinaan Khusus Anak
- Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan

Secara geografis UPT di wilayah Papua Barat saling berjauhan sehingga menyebabkan kesulitan dalam melakukan monitoring dan evaluasi

## SASARAN KEGIATAN 15

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya Pelayanan Tahanan di wilayah sesuai standar</i>	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan tiga indikator kinerja yaitu (1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying (2) Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum (3) Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitasi Bantuan Hukum

### a. Capaian

#### 1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying

Tabel III.66 Capaian Indikator Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})}{\Sigma(\text{Target Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (100)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 125 \%$$

Tabel III.67 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Menurunnya Tahanan Yang Overstaying

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	80%	80%	100%
2021	Persentase menurunnya tahanan yang overstaying	70%	90%	128.6%

## 2) Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tabel III.68 Capaian Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	87,5%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})}{\Sigma(\text{Target Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (100)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 125 \%$$

Tabel III.69 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	80%	70%	87,5%
2021	Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%	90%	128.6%

## 3) Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tabel III.70 Capaian Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	60%	75%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})}{\Sigma(\text{Target Indeks Penyelenggaraan Pemasarakatan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma(100)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 125\%$$

Tabel III.71 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	80%	60%	75%
<b>2021</b>	Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%	80%	114.3%

#### b. Analisa

- 1) Persentase menurunnya tahanan yang overstaying
  - Jumlah Tahanan 1348
  - Jumlah Tahanan Overstaying 0
- 2) Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
  - Jumlah tahanan yang memperoleh layanan penyuluhan hukum 943
  - Jumlah tahanan 1348
- 3) Persentase Tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum
  - Jumlah tahanan yang memperoleh fasilitas bantuan hukum 808
  - Jumlah tahanan 1348

Faktor tidak tercapainya target yaitu ;

- Terdapatnya gangguan jaringan internet sehingga menyebabkan keterlambatan dalam laporan;
- Masih rendahnya pemahaman hukum bagi tahanan yang sedang menjalani proses persidangan;
- Belum terciptanya sinergitas secara maksimal antara pos BAKUM baik secara internal maupun eksternal;

## SASARAN KEGIATAN 16

<i>Sasaran Kegiatan</i>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya Pelayanan Pembinaan Kepribadian, Pelatihan Vokasi, Pendidikan dan Penanganan Narapidana Resiko Tinggi</i>	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
	persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
	persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
	persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin
	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi
	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan delapan indikator kinerja yaitu (1) Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian (2) persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi (3) persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi (4) Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin (5) Persentase Tahanan yang memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum (6) Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi (7) Persentase narapidana yang bekerja dan produktif (8) Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

### a. Capaian

## 1) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

Tabel III.72 Capaian Indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik})}{\Sigma(\text{Target Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (65)}{\Sigma(65)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.73 Perbandingan Capaian Indikator Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadia

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian	65%	65%	100%
<b>2021</b>	Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian	60%	65%	108.3%

## 2) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Tabel III.74 Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	90%	91,8%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi})}{\Sigma(\text{Target Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (90)}{\Sigma(98)} \times 100\% = 91 \%$$

Tabel III.75 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Remisi

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	98%	90%	91,8%
<b>2021</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi	97%	100%	103.1%

## 3) Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi



Tabel III.76 Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	75%	93,7%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi})}{\Sigma (\text{Target Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (75)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 93,7\%$$

Tabel III.77 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Integrasi

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	80%	75%	93,7%
<b>2021</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi	75%	100%	133.3%

#### 4) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Nilai Baik Dengan Predikat Memuaskan Pada Instrument Penilaian Kepribadian

Tabel III.78 Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	80%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan})}{\Sigma (\text{Target Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (80)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.79 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Mendapatkan Hak Pendidikan

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	80%	80%	100%
<b>2021</b>	Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan	75%	80%	106.7%

**5) Persentase Narapidana Resiko Tinggi Yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh Dan Disiplin**

Tabel III.80 Capaian Indikator Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	-	0%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Narapidana yang berubah perilakunya})}{\Sigma(\text{Target Persentase Narapidana yang berubah perilakunya})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (0)}{\Sigma(15)} \times 100\% = 0 \%$$

Tabel III.81 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	15%	-	0%
<b>2021</b>	Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Disiplin	13%	20%	153.8%

**6) Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi**

Tabel III.82 Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi</b>	28%	25%	89,2%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan})}{\Sigma(\text{Target Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (25)}{\Sigma(28)} \times 100\% = 89,2 \%$$

Tabel III.83 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Memperoleh Pendidikan Dan Pelatihan Vokasi Bersertifikasi

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	28%	25%	89,2%
2021	Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi	25%	90%	360%

## 7) Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

Tabel III.84 Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	60%	89,5%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif})}{\Sigma (\text{Target Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (60)}{\Sigma (67)} \times 100\% = 89,5 \%$$

Tabel III.85 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Narapidana Yang Bekerja Dan Produktif

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	67%	60%	89,5%
2021	Persentase narapidana yang bekerja dan produktif	62%	80%	129%

## 8) Jumlah Narapidana Yang Mengikuti Pendidikan Tinggi

Tabel III.86 Capaian Indikator Jumlah Narapidana Yang Megikuti Pendidikan Tinggi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	-	0%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi})}{\Sigma (\text{Target Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan Tinggi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (0)}{\Sigma (30)} \times 100\% = 0 \%$$

Tabel III.87 Perbandingan Capaian Indikator Jumlah Narapidana Yang Megikuti Pendidikan Tinggi

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi	30 orang	-	0%
<b>2021</b>	-	-	-	-

**b. Analisa**

1. Persentase narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrument penilaian kepribadian
  - Jumlah narapidana yang memperoleh nilai baik dengan predikat memuaskan pada instrumen penilain kepribadian 900
  - Jumlah narapidana resiko tinggi yang mendapatkan program pembinaan 0
2. Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi
  - Jumlah narapidana yang mendapatkan hak remisi 884
  - Jumlah narapidana yang memenuhi syarat substantif dan administrative untuk diusulkan mendapatkan remisi 983
3. Persentase narapidana yang mendapatkan hak integrasi
  - Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Program Reintegrasi Sosial 325
  - Jumlah Narapidana yang Memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan mendapatkan Program Reintegrasi Soisal 434
4. Persentase narapidana yang mendapatkan hak Pendidikan
  - Jumlah Narapidana yang Mendapatkan Hak Pendidikan 112
  - Jumlah Narapidana yang Tidak Memiliki Latarbelakang Pendidikan formal 112
5. Persentase Narapidana resiko tinggi yang berubah perilakunya menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin
  - Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Berubah Perilakunya Menjadi Sadar, Patuh dan Dispilin 0
  - Jumlah Jumlah Narapidana Resiko Tinggi yang Mendapatkan Program Pembinaan 0
6. Persentase narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi

- Jumlah Narapidana yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan vokasi bersertifikasi 337
  - Jumlah Narapidana 1348
7. Persentase narapidana yang bekerja dan produktif
- Jumlah narapidana yang bekerja dan produktif 123
  - Jumlah narapidana yang menjalankan program asimilasi 205
8. Jumlah Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi
- Untuk Papua Barat belum ada Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

Faktor tidak tercapainya target yaitu ;

- Sebagian Narapidana masih susah untuk melaksanakan kegiatan pembinaan
- Keterlabatan pengiriman rekapan penilaian SPPN oleh Wali PAS
- Keterlambatan verifikasi pengusulan dari operator pusat
- Untuk Papua Barat Tidak ada Narapidana high risk
- Kurangnya sarana dan prasarana
- Kurangnya peralatan kerja serta tempat kerja
- Untuk Papua Barat belum ada Narapidana yang mengikuti Pendidikan tinggi

## SASARAN KEGIATAN 17

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya Pelayanan Pengelolaan Basan Baran di wilayah sesuai standar</i>	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya

Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan dua indikator kinerja yaitu (1) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya (2) Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap

**a. Capaian**

**1) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya**

Tabel III.88 Capaian Indikator Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya	70%	70%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase benda sitaan dan barang rampasan})}{\Sigma (\text{Target Persentase benda sitaan dan barang rampasan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (70)}{\Sigma (70)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.89 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	70%	70%	100%
<b>2021</b>	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang terjaga kualitas dan kuantitasnya	60%	75%	125%

Terjaga Kualitas Dan Kuantitasnya

**2) Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap**

Tabel III.90 Capaian Indikator Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap	60%	57%	95%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi})}{\Sigma (\text{Target Persentase narapidana yang mendapatkan hak remisi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (57)}{\Sigma (60)} \times 100\% = 95 \%$$

Tabel III.91 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Benda Sitaan Dan Barang Rampasan Yang Dikeluarkan Berdasarkan Putusan Yang Berkuatan Hukum Tetap

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	60%	57%	95%
2021	Persentase benda sitaan dan barang rampasan yang dikeluarkan berdasarkan putusan yang berkuatan hukum tetap	40%	50%	125%

#### b. Analisa

Jumlah Rekomendasi Lelang Basan Baran sebanyak 7

Jumlah Penilaian Depresiasi Basan Baran 7

Jumlah Benda Sitaan yang telah Eksekusi 4

Jumlah Benda Sitaan yang telah Inkrah 7

Faktor tidak tercapainya target yaitu ;

- kurangnya SDM khususnya di bagian pemeliharaan dan penelitian basan dan baran serta belum adanya pelatihan khusus (diklat) terkait pemeliharaan dan penelitian basan dan alat-alat Pemeliharaan
- koordinasi Rupbasan Kelas I Manokwari dengan Kejaksaan Negeri Manokwari yaitu minimnya anggaran;
- koordinasi Kejaksaan ke Kantor KPKNL Sorong dikarenakan beda wilayah dan kabupaten, melewati jalur laut/udara serta hasil penilaian Baran terlalu tinggi yang mengakibatkan tidak ada peminat.

## SASARAN KEGIATAN 18

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya pelayanan pembimbingan klien pemasyarakatan dan pemenuhan hak pendidikan klien anak pada luar lembaga di wilayah sesuai standar</i>	Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga
	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
	Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan tiga indikator kinerja yaitu (1) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar lembaga (2) Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara (3) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya

### a. Capaian

#### 1) Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga

Tabel III.92 Capaian Indikator Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga

<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
<b>Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga</b>	50%	30%	60%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Klien Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga})}{\Sigma(\text{Target Persentase Klien Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (30)}{\Sigma(50)} \times 100\% = 60 \%$$

Tabel III.93 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga



Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	50%	30%	60%
2021	Persentase Klien Usia Produktif Yang Memperoleh Atau Melanjutkan Pekerjaan Di Luar Lembaga	40%	45%	112.5%

## 2) Persentase Menurunnya Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara

Tabel III.94 Capaian Indikator Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	50%	83,3%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana})}{\Sigma (\text{Target Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (50)}{\Sigma (60)} \times 100\% = 83,3 \%$$

Tabel III.95 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara	60%	50%	83,3%
2021	Persentase Anak Yang Mendapatkan Putusan Pidana Penjara	50%	100%	200%

## 3) Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Tabel III.96 Capaian Indikator Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	0%	0%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya})}{\Sigma (\text{Target Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (0)}{\Sigma (30)} \times 100\% = 0 \%$$

Tabel III.97 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	30%	0%	0%

<b>2021</b>	Persentase Klien Anak Yang Terpenuhi Hak Pendidikannya	25%	35%	140%
-------------	--	-----	-----	------

**b. Analisa**

- 1) Persentase klien usia produktif yang memperoleh atau melanjutkan pekerjaan di luar Lembaga
  - Jumlah Klien Usia Produktif yang Memperoleh atau Melanjutkan Pekerjaan di Luar Lembaga
  - Jumlah Klien Usia Produktif 4
- 2) Persentase Menurunnya Anak yang mendapatkan putusan pidana penjara
  - Jumlah Anak yang mendapatkan Putusan Pidana Penjara 3
  - Jumlah Pendampingan Anak 6
- 3) Persentase klien Anak yang terpenuhi hak pendidikannya
  - Jumlah Klien Anak yang Melanjutkan Pendidikan 0
- 4) Program pembimbingan di Bapas belum mengakomodir kebutuhan klien Belum maksimalnya tingkat koordinasi dengan para APH lainnya

**SASARAN KEGIATAN 19**

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak di LPKA dan Pengentasan Anak di wilayah sesuai standar</i>	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan empat indikator kinerja yaitu (1) Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat (2) Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi (3) Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar (4) Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal

**a. Capaian**

**1) Persentase Anak Yang Mengikuti Kegiatan Pendidikan Keterampilan Dan Bersertifikat**

Tabel III.98 Capaian Indikator Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Anak mengikuti Pendidikan keterampilan dan bersertifikat})}{\Sigma (\text{Target Persentase Anak mengikuti Pendidikan keterampilan dan bersertifikat})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (75)}{\Sigma (75)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.99 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	75%	75%	100%
2021	Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat	70%	75%	107.2%

**2) Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi**

Tabel III.100 Capaian Indikator Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi})}{\Sigma (\text{Target Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (100)}{\Sigma (100)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.101 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi	100%	100%	100%
2021	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Integrasi	100%	100%	100%

### 3) Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar

Tabel III.102 Capaian Indikator Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	-	0%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar})}{\Sigma (\text{Target Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (0)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 0\%$$

Tabel III.103 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar	80%	-	0%
2021	Persentase Anak Yang Memperoleh Hak Pengasuhan Sesuai Standar	70%	72%	103%

### 4) Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal

Tabel III.104 Capaian Indikator Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	65%	81,2%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal})}{\Sigma (\text{Target Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (65)}{\Sigma (80)} \times 100\% = 81,2\%$$

Tabel III.105 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal	80%	65%	81,2%
2021	Persentase Anak Yang Mengikuti Pendidikan Formal Dan NonFormal	70%	80%	114.3%

#### b. Analisa

- 1) Persentase Anak yang mengikuti kegiatan Pendidikan keterampilan dan bersertifikat
  - Jumlah Anak yang Terampil 3
  - Jumlah Anak yang Mengikuti Pendidikan Keterampilan 3
- 2) Persentase Anak yang memperoleh hak integrasi
  - Jumlah Anak yang memperoleh Hak Integrasi 15
  - Jumlah Anak yang memenuhi Syarat Substantif dan Administratif untuk diusulkan memperoleh Hak Integrasi 15
- 3) Persentase Anak yang memperoleh Hak Pengasuhan sesuai standar
  - Untuk Papua Barat Anak belum memperoleh Hak Pengasuhan
- 4) Persentase anak yang mengikuti pendidikan formal dan non formal
  - Jumlah Anak yang Memperoleh Hak Pendidikan Formal dan NonFormal 4
  - Jumlah Anak 6

### SASARAN KEGIATAN 20

#### Sasaran Kegiatan

#### Indikator Kinerja Kegiatan

<i>Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban</i>	Persentase pengaduan yang diselesaikan
	Persentase pencegahan gangguan kamtib
	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan empat indikator kinerja yaitu (1) Persentase pengaduan yang diselesaikan (2) Persentase pencegahan gangguan kamtib (3) Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib (4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

## a. Capaian

### 1) Persentase Pengaduan Yang Diselesaikan

Tabel III.106 Capaian Indikator Persentase pengaduan yang diselesaikan

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	80%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase pengaduan yang diselesaikan})}{\Sigma(\text{Target Persentase pengaduan yang diselesaikan})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (75)}{\Sigma(75)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.107 Perbandingan Capaian Indikator Persentase pengaduan yang diselesaikan

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase pengaduan yang diselesaikan	80%	80%	100%
2021	Persentase pengaduan yang diselesaikan	70%	80%	114.3%

### 2) Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

Tabel III.108 Capaian Indikator Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	67%	95,7%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase pencegahan gangguan kamtib})}{\Sigma(\text{Target Persentase pencegahan gangguan kamtibi})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma(67)}{\Sigma(70)} \times 100\% = 95,7\%$$

Tabel III.109 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Pencegahan Gangguan Kamtib

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase pencegahan gangguan kamtib	70%	67%	95,7%
<b>2021</b>	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	90%	150%

### 3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tabel III.110 Capaian Indikator Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib</b>	80%	78%	97,5%

$$\% = \frac{\Sigma(\text{Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib})}{\Sigma(\text{Target Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma(78)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 97,5\%$$

Tabel III.111 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase kepatuhan dan Disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku gangguan Kamtib	80%	78%	97,5%
<b>2021</b>	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	106.7%

### 4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Tabel III.112 Capaian Indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas</b>	70%	70%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib})}{\Sigma (\text{Target Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (70)}{\Sigma (70)} \times 100\% = 100\%$$

Tabel III.113 Perbandingan Capaian Indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
<b>2022</b>	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	100%
<b>2021</b>	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	116.7%

#### b. Analisa

- Jumlah Pengaduan yang di selesaikan di kantor wilayah sebanyak 7 Pengaduan sementara menunggu proses tindak lanjut dari pusat
- Jumlah Pengaduan yang masuk dari bulan Januari sampai dengan November 2022 sebanyak 7 Pengaduan
- Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak 12
- Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi sebanyak 18
- Jumlah Tahanan / Narapidana /Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya 14
- Jumlah Pelaku gangguan Kamtib 18
- Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas sebanyak 18
- Jumlah Gangguan Kamtib 18

Kendala atau Hambatan yaitu

- Menunggu hasil dari proses tindak lanjut pengaduan yang begitu lama.
- Pada UPT Lapas Manokwari dan Lapas Sorong WBP dalam Blok Hunian masih di campur, tidak dalam pemisahan sesuai dengan tindak kejahatan di karenakan selain over-kapasitas, tempat yang tidak memadai.
- WBP dalam Blok Hunian pada UPT Lapas/ Rutan yang lain masih di campur, tidak dalam pemisahan sesuai dengan tindak kejahatan di karenakan tidak ada



penempatan blok, Maksimum Security, Medium Security, dan Minimum Security pada seluruh UPT Lapas/ Rutan.

- Rasio perbandingan jumlah petugas pengamanan dengan jumlah WBP tidak sebanding dikarenakan masih kurangnya jumlah petugas pengamanan pada seluruh UPT Lapas/ Rutan
- Masih adanya Tahanan/Narapidana/Anak yang melanggar disiplin terhadap tata tertib.
- Kurangnya sarana dan prasarana.

## SASARAN KEGIATAN 21

<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator Kinerja Kegiatan</b>
<i>Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di wilayah sesuai standar</i>	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar
	Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah
	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib
	Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Sasaran Kegiatan ini dicapai dengan empat indikator kinerja yaitu (1) Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar (2) Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah (3) Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib (4) Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

### a. Capaian

#### 1) Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Tabel III.114 Capaian Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar})}{\Sigma(\text{Target Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (80)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.115 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar	80%	80%	100%
2021	Persentase pengaduan yang diselesaikan	70%	80%	114.3%

## 2) Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Tabel III.116 Capaian Indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah	70%	67%	95,7%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah})}{\Sigma(\text{Target Persentase gangguan kamtib yang dapat dicegah})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (67)}{\Sigma(70)} \times 100\% = 95,7 \%$$

Tabel III.117 Perbandingan Capaian Indikator Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	70%	67%	95,7%
2021	Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%	90%	150%

### 3) Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Tabel III.118 Capaian Indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	78%	97,5%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib})}{\Sigma(\text{Target Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (78)}{\Sigma(80)} \times 100\% = 97,5 \%$$

Tabel III.119 Perbandingan Capaian Indikator Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase kepatuhan dan disiplin terhadap tata tertib oleh Tahanan/Narapidana/ Anak pelaku gangguan kamtib	80%	78%	97,5%
2021	Persentase Kepatuhan Dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan/Narapidana/Anak Pelaku Gangguan Kamtib	75%	80%	106.7%

### 4) Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Tabel III.120 Capaian Indikator Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas	70%	70%	100%

$$\% = \frac{\Sigma (\text{Realisasi Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib})}{\Sigma(\text{Target Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib})} \times 100$$

$$\% = \frac{\Sigma (70)}{\Sigma(70)} \times 100\% = 100 \%$$

Tabel III.121 Perbandingan Capaian Indikator Persentase pemulihan kondisi keamanan pasca gangguan kamtib secara tuntas

Tahun	Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
2022	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	70%	70%	100%

<b>2021</b>	Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%	70%	116.7%
-------------	---	-----	-----	--------

**a. Analisa**

- Jumlah Pengaduan yang di selesaikan di kantor wilayah sebanyak 7 Pengaduan sementara menunggu proses tindak lanjut dari pusat.
- Jumlah gangguan kamtib yang dapat dicegah sebanyak 12  
Jumlah seluruh gangguan kamtib yang terjadi sebanyak 18
- Jumlah Tahanan / Narapidana /Anak Pelaku gangguan Kamtib yang mengulangi pelanggarannya 14  
Jumlah Pelaku gangguan Kamtib 18
- Jumlah Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib secara Tuntas sebanyak 18  
Jumlah Gangguan Kamtib 18

Faktor yang memperngaruhi tidak tercapainya target yaitu ;

- kelengkapan fasilitas kantor yang berfungsi dalam memberikan informasi belum memadai seperti Jaringan internet sering terjadi error, sehingga menghambat sistem penanganan pengaduan
- Kurangnya pemahaman petugas tentang SOP Pengamanan
- Masih adanya Tahanan/Narapidana/Anak yang melanggar disiplin terhadap tata tertib
- Kurangnya sarana dan prasarana

## B. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2022 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat memperoleh Pagu sebesar **Rp. 26.573.857.000** pagu yang terealisasi sebesar **Rp. 25.792.098.115** yaitu **97,06 %** meningkat dari tahun sebelumnya. Berikut adalah rincian realisasi anggaran Kantor Wilayah Papua Barat.

Tabel III.122 Capaian Anggaran Berdasarkan Belanja

Belanja	Total		Capaian
<b>Belanja Pegawai</b>	6.975.500.000	6.600.547.087	95%
<b>Belanja Barang</b>	12.288.091.000	11.905.957.728	97%
<b>Belanja Modal</b>	7.310.266.000	7.285.593.300	100%
<b>Total</b>	<b>26.573.857.000</b>	<b>25.792.098.115</b>	<b>97,06 %</b>

Tabel III.123 Capaian Anggaran Berdasarkan 9 Satker Kanwil

9 Satuan Kerja Kantor Wilayah	Total		Capaian
	Pagu	Realisasi	
Program Dukungan Manajemen	18.935.233.000	18.458.177.448	97%
Program AHU	1.961.271.000	1.742.703.350	89%
Program Pemasarakatan	1.078.974.000	1.078.940.640	100%
Program Kemigrasian	2.507.776.000	2.507.690.127	100%
Program KI	1.059.908.000	1.035.003.350	98%
Program PP	185.000.000	172.056.400	93%
Program Pemajuan HAM	259.675.000	245.583.400	95%
BPHN	474.708.000	447.337.600	94%
BALITBANG HAM	111.312.000	104.605.800	94%

<b>Total</b>	<b>26.573.857.000</b>	<b>25.792.098.115</b>	<b>97,06 %</b>
--------------	-----------------------	-----------------------	----------------

Tabel III.124 Perbandingan Pagu dan Realisasi Anggaran Dengan Tahun Sebelumnya

Capaian Realisasi Anggaran	Tahun	
	2021	2022
Pagu	20.791.698.000	26.573.857.000
Realisasi	19.330.648.464	25.792.098.115
Capaian	86,9%	97,06 %

### C. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

Capaian Kinerja Keuangan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat dihasilkan dari 2 (dua) variable yaitu Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA dan Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA).

#### 1. Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA

Nilai Smart Dja pada Kantor Wilayah terdiri dari 9 (Sembilan) program yang dijelaskan pada table dibawah ini.

Tabel III.125 Nilai Kinerja Pada Aplikasi SMART DJA

No	Kode Satker	Nama Satker	Kinerja	Penyerapan	Konsistensi	Cro	Efisiensi	Nilai Efisiensi
1	667772	(SEKJEN)	98,25	95,03	93,01	100	20	100
2	667773	(AHU)	95,52	79,82	86,12	100	20	100
3	667774	(PAS)	99,78	100	98,8	100	20	100
4	667775	(IMIGRASI)	99,91	100	99,49	100	20	100
5	667776	(KI)	95,44	80,51	85,34	100	20	100
6	667777	(PP)	97,95	93	92,47	100	20	100
7	667778	(HAM)	97,53	94,57	89,31	100	20	100
8	667779	(BPHN)	97,38	94,23	88,68	100	20	100
9	667780	(Balitbang)	96,91	93,98	86,23	100	20	100
<b>Rata-rata</b>			97,63					

## 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA)

Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-4/PB/2020 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga pasal 23 menyebutkan bahwa nilai IKPA dikategorikan menjadi ;

- a. Sangat baik, apabila nilai IKPA > 95;
- b. Baik, apabila 89 < nilai IKPA < 95;
- c. Cukup, apabila 70 < nilai IKPA < 89; atau
- d. Kurang, apabila nilai IKPA <70.

Nilai IKPA pada Kantor Wilayah terdiri dari 9 (Sembilan) program yang dijelaskan pada table dibawah ini.

Tabel III.126 Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran

No	Kode Satker	Kualitas Perencanaan Anggaran			Kualitas Pelaksanaan Anggaran				Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
		Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output			
1	667774	100	92,9	93,52	0	0	98,94	100	100	77,89	80%	97,36
2	667775	100	84,98	84,79	0	0	0	100	100	65,46	70%	93,51
3	667772	100	76,06	92,75	95,5	95,45	98,23	100	100	95,07	100%	95,07
4	667777	100	35,64	89,36	0	0	75,17	100	100	68,95	80%	86,19
5	667779	100	59	79,82	0	0	80,55	100	100	69,92	80%	87,4
6	667776	100	47,47	91,35	0	0	0	100	100	63,02	70%	90,02
7	667780	100	30,89	84,89	0	0	67,83	100	100	66,85	80%	83,56
8	667773	100	36,84	78,4	0	0	0	100	100	59,36	70%	84,81
9	667778	100	46,05	82,1	0	0	83,76	100	100	69,4	80%	86,75

Dari table diatas dapat disimpulkan bahwa;

- Nilai Deviasi halaman III DIPA belum mencapai nilai sangat baik karena Satker terlambat melakukan penyesuaian hal III DIPA;
- Nilai Penyerapan Anggaran belum mencapai nilai sangat baik karena terdapat perubahan jadwal kegiatan sehingga penyerapan anggaran tidak dapat mencapai target penyerapan anggaran per triwulan;
- Nilai Pengelolaan UP dan TUP belum mencapai nilai sangat baik karena Satker terlambat mengajukan pertanggungjawaban UP;
- Untuk Nilai Belanja Kontraktual dan Penyelesaian tagihan memiliki nilai 0 karena Satker Satker tidak memiliki belanja kontraktual sehingga tidak ada penyelesaian tagihan. Jadi indikator belanja kontraktual dan penyelesaian tagihan memiliki kaitan. Nilai yang 0 ini, tidak berpengaruh terhadap nilai akhir IKPA.

## D. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

### 1. E-Performance

Pelaksanaan Monitoring pencapaian target pada perjanjian kinerja dilakukan melalui website e-performance yang dilakukan setiap bulan. Dalam pelaksanaannya penggunaan website ini kurang dimanfaatkan dengan baik dikarenakan kurangnya pemahaman dalam penisian data. Cara menghitung capaian perbulan dari target pertahun yang membuat para operator mengisinya pada triwulan 4. Berikut adalah capaian Kinerja pada website e-performance.

Tabel III.127 Capaian Kinerja Pada E-Performance

TAHUN		2022		Tabulasi Pengukuran Kinerja		KANTOR WILAYAH PAPIA BARAT		Tampilkan					
TIDAK TERCAPI (=100%)													
ID	NAMA UNIT	CAPAIAN KINERJA	TIDAK ADA TARGET	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	00.00	TOTAL	TERCAPI (100%)	MELEBIHI TARGET (>100%)	JUMLAH INDIKATOR
				1/3	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3				
50	KANTOR WILAYAH PAPIA BARAT	TV1	40								5	3	54
		TV2	44	2						2	3	54	
		TV3	49								3	54	
		TV4	4	5	3	2	5	8	23		11	54	

### 2. Target Kinerja Kantor Wilayah

Tabel III.128 Rekapitulasi Nilai Target Kinerja Tahun 2022

Target Kinerja	Hasil
Divisi Administrasi	100



Divisi Pelayanan Hukum Dan Ham	100
Divisi Pemasyarakatan	100
Divisi Imigrasi	100

Perhitungan nilai Target Kinerja pada Tahun 2022 baru mencakup periode B01-B09 dikarenakan periode B10-B12 belum diverifikasi oleh unit eselon I.

Nilai tarja yang dibawah 100 disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- Kelengkapan data dukung;
- Kegiatan yang dilaksanakan belum sesuai dengan target yang ditetapkan (belum semua Kab/Kota menerima layanan);
- Beberapa format laporan yang dibuat belum sesuai dengan arahan masing-masing Unit Eselon I.



#### 4. Kegiatan Prioritas Nasional

a) Deklarasi Janji Kinerja Tahun 2022

Deklarasi Janji Kinerja Pada Lingkungan Kantor Wilayah dilaksanakan pada Selasa, 13 Januari 2022 bertempat di Aula Kantor Wilayah. Selain deklarasi janji kinerja, kegiatan juga dilakukan dengan penyerahan secara simbolis Surat Pencatatan Hak Cipta oleh Kakanwil kepada Robert K.R Hammar atas 13 Pencatatan Hak Cipta terdiri dari 7 ciptaan lagu, 2 Bunga Rampai dan 4 Buku. Pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan Robert K.R Hammar merupakan pendaftar pertama yang melakukan pendaftaran Hak Cipta atas karyanya di Tahun 2022 ini melalui Aplikasi Persetujuan Otomatis Pencatatan Hak Cipta (POPHC). Hadir dalam kegiatan ini, Asisten I Setda Prov. Papua Barat, Perwakilan Ombudsman Papua Barat, Kepala BNN Papua Barat, Wakil ketua DPR Prov.Papua Barat, Ketua MRP Papua Barat serta perwakilan Kejaksaan Tinggi, WaKaPolda Papua Barat dan perwakilan dari Pangdam.

b) Pengawasan Penerapan Prinsip Mengenal Penguna Jasa (PMPJ)

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka mencegah tindak pidana Pencucian uang dan pendanaan terorisme dengan dasar hukum UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan UU No 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantas Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (UU TPPT). Kegiatan dilaksanakan pada bulan Maret dalam bentuk sosialisasi serta Pengisian Form CDD Customer Due Deiligence dan EDD Enhanced Due Diligence kepada Notaris di wilayah Papua Barat, dimana dari hasil pengisian form tersebut terdapat 4 (empat) Notaris yang berpotensi melakukan tindak pidana tersebut. Pada 4 (empat) Notaris tersebut 3 (tiga) diantaranya telah dilakukan audit.

Audit Notaris

- Maret : Suyanto, S.H., M.Kn (Notaris Kab. Manokwari)
- Juni : Nova Arifin, S.H., M.Kn (Notaris Kota Sorong)
- Agustus: Monalisa Rachmat, S.H., M.Kn (Notaris Kab. Sorong)

## **A. KESIMPULAN**

Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No M.HH-01.PR-03 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LJKIP) di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Sebagai perpanjangan tangan dari Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat telah melaksanakan capaian kinerjanya yang secara umum menunjukkan kinerja yang baik. Dari hasil analisa pengukuran capaian kinerja terhadap target sasaran kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran, beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut;

1. Dari Jumlah 54 Indikator 33 indikator telah terlaksana, terdapat 21 Indikator yang tidak mencapai target 4 diantaranya tidak terlaksana.
2. Secara keseluruhan Capaian Target Perjanjian Kinerja dan Realisasi Anggaran Tahun 2022 meningkat dari tahun sebelumnya.

## **B. SARAN**

Yang menjadi catatan untuk peningkatan Kinerja pada Tahun yang akan datang yaitu :

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berbagai pelatihan yang menunjang tugas dan fungsi kantor wilayah;
2. Dengan diberlakukannya restrukturisasi program kegiatan perlu penambahan tenaga/staf pada masing-masing Divisi melalui rekrutment CPNS;
3. Guna pengembangan karir dan kebutuhan organisasi maka perlu dilakukan percepatan masa tugas dengan melaksanakan kegiatan rotasi/mutasi para pejabat dan pengisian jabatan yang selama ini masih kosong;
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan Kinerja perlu diadakan bimbingan teknis bagi petugas penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah maupun UPT;
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana pada Unit Pelaksana Teknis akan ditingkatkan dalam menunjang Capaian Kinerja Unit Pelaksana Teknis dan juga Kantor Wilayah.

6. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah akan terus dilakukan dalam peningkatan Kinerja yang berhubungan langsung dengan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

**Manokwari, 5 Januari 2023**

**Kepala Kantor Wilayah**



**TAUFIQURRAKHMAN**

**NIP 196811181991031001**